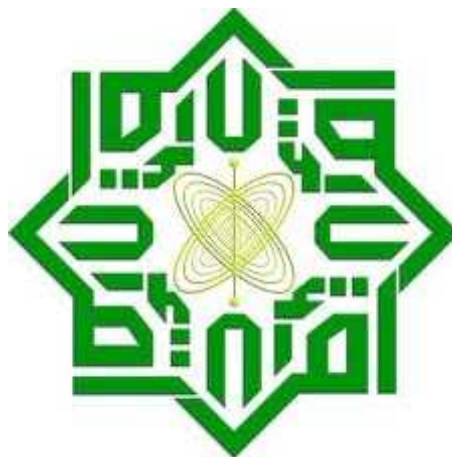


**PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Terhadap Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

**TAMRIN
NIM. 21091101245**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2012/2013**

PENGESAHAN PENGUJI
NOMOR : UN. /PPs/PP.00.9/ /2013

Tesis berjudul : **“PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)”** yang ditulis oleh Saudara **TAMRIN, NIM. 1003 S2 1245** telah dimunaqasyahkan pada hari Jum’at tanggal 13 Juni 2013 dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah dengan Yudisium Baik, IPK 3,1.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua
DR. H. MAWARDI M. SALEH, M.A

Sekretaris
Prof.DR. M. ARRAFIE ABDUH, M.Ag

Penguji I
DR. ZULKAYANDRI, M.Ag

Penguji II
Prof. DR. MAHDINI, M.A

Pekanbaru, 31 Mei 2013

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Suska Riau,
,

Prof. DR. MAHDINI, M.A

Prof. DR. H. Alaidin Koto, M.A
Dosen Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sulthan Syarif Kasim Riau

Nota Dinas

Hal : *Tesis An. Tamrin*

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Suska Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya isi tesis saudara :

Nama : **Tamrin**
NIM : **21091101245**
Prog. Studi : Hukum Islam
Kosentrasi : Hukum Islam
Judul : **PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi
Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 568 K/AG/2008).**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diberikan penilaian, sekian dan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 08 Juni 2013
Pembimbing I,

Prof. DR. H. Alaidin Koto, M.A

Prof. DR. Mahdini, M.A
Dosen Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri
Sulthan Syarif Kasim Riau

Nota Dinas

Hal : *Tesis An. Tamrin*

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Suska Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya isi tesis saudara :

Nama : **Tamrin**
NIM : **21091101245**
Prog. Studi : Hukum Islam
Kosentrasi : Hukum Islam
Judul : **PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi
Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 568 K/AG/2008).**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diberikan penilaian, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 08 Juni 2013
Pembimbing II,

Prof. DR. Mahdini, M.A

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis :

Nama : 1. **Prof. DR. Alaidin Koto, M.A**
2. **Prof. DR. Mahdini, M.A**

Dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul : **PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)**, yang ditulis oleh :

Nama : **Tamrin**
NIM : **21091101245**
Prog. Studi : Hukum Islam
Kosentrasi : Hukum Islam

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Pembimbing II,

Pekanbaru, 08 Juni 2013
Pembimbing I,

Prof. DR. Mahdini, M.A

Prof. DR. H. Alaidin Koto, M.A

Mengetahui :
Ketua Prodi Hukum Islam,

DR. M. Arrafie Abduh, M.Ag

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis :

Nama : 1. **Prof. DR. Alaidin Koto, M.A**
2. **Prof. DR. Mahdini, M.A**

Dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul : **PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)**, yang ditulis oleh :

Nama : **Tamrin**
NIM : **21091101245**
Prog. Studi : **Hukum Islam**
Kosentrasi : **Hukum Islam**

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Pembimbing II,


Prof. DR. Mahdini, M.A

Pekanbaru, 08 Juni 2013
Pembimbing I,


Prof. DR. H. Alaidin Koto, M.A

Mengetahui :
Ketua Prodi Hukum Islam,

DR. M. Arrafie Abduh, M.Ag

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tamrin**
Nomor Induk Mahasiswa : **21091101245**
Tempat/Tanggal Lahir : Huta Bargot, 01 Januari 1968
Program : Magister
Prog. Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya susun judul : **"PEMBERIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008),"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sangsi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sangsi-sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 08 Juni 2013

TAMRIN
NIM. 21091101245

KATA PENGANTAR
بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. karena hanya dengan petunjuk dan bimbinganNya serta karunia dan pertolonganNya Tesis yang berjudul: **“PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)”** ini dapat diselesaikan. Demikian juga Shalawat dan Salam penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materil maupun spirituil. Oleh karena itu, maka sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau beserta Assisten Direktur I dan II,
2. Bapak Prof. DR. H. Alaidin Koto, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. DR. Mahdini, M.A, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan tesis ini,
3. Bapak dan Ibu para Dosen beserta Karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

4. Bapak Kepala Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau beserta para karyawan dan Bapak beserta ibu Karyawan Perpustakaan program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau penyusunan tesis ini.
5. Isteriku tercinta dan anak-anakku tersayang, Almarhum Ayahanda dan Ibunda tercinta, abang dan adik-adikku tersayang yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau sampai dengan penyusunan tesis ini.
6. Semua rekan-rekan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan, Demikian, semoga tesis ini ada manfaatnya.

Wassalam
Penulis,

TAMRIN
NIM. 1003 S2 1245

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
AT-TAJRID	xv
TRANSLITERASI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	16
1. Identifikasi Masalah.....	16
2. Batasan Masalah	16
3. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Studi Kepustakaan	19
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II : TINJAUAN TEORI	
A. Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Tujuan dan Alasannya	26
1. Pengertian Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Tujuan dan Alasannya	26
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dan Perkembangannya di Indonesia	33
3. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan.....	41
4. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak	46
5. Pencatatan Anak di Kantor Catatan Sipil	49
B. Pengangkatan Anak Dalam Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam	56
1. Pengangkatan Anak Dalam Tinjauan Hukum Adat	56
2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam dan Akibat Hukumnya	59
C. Hibah dan Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif	67
1. Pengertian Hibah dan Wasiat	67
2. Pelaksanaan Hibah dan Wasiat.....	69
3. Hibah dan Wasiat Dalam KHI dan KUHAPerdata	71

BAB III : TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA	
A. Peradilan Agama ; Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya, Tujuan dan Fungsinya.....	80
B. Sumber dan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama	84
C. Kekuasaan dan Kewenangan Dalam Hukum Acara Perdata.....	86
D. Beberapa Istilah Dalam Hukum Acara Perdata.....	91
E. Pembuktian, Putusan, Banding dan Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata	98
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keputusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006/PA.Pbr Tentang Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat	111
B. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr	125
C. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Mahkamah Agung RI Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr.....	139
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor: 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr Tentang Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat.....	146
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran-saran	165
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	168
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008).** Penelitian ini dipilih karena penulis melihat adanya perbedaan dalam hal pemberian hibah kepada anak angkat antara keputusan PA Pekanbaru, PTA Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI. Padahal, masing-masing lembaga pengadilan menggunakan sumber dan referensi hukum yang sama, yaitu Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdota dan peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengungkap sengketa pemberian hibah kepada anak angkat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, atas nama Aminah binti Rajiman yang beralamat di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A I No. 39, Pekanbaru, yang merupakan anak angkat dari Almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Sumber data primer: Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor : 362/Pdt.G/ 2006 /PA.Pbr, Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Pekanbaru Nomor : 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 568 K/AG/2008, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Analisis data menggunakan metode *Content Analysis* (Analisis Isi), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, lisan, tulisan dan lain sebagainya.

Hasil Penelitian : Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr Tanggal 26 Juli 2007 tentang Kewarisan, dalam memutuskan perkara pemberian hibah yang telah diterima oleh Aminah binti Rajiman dinilai cacat hukum, karena: (1)terdapat perbedaan nomor dan tanggal surat dan akta hibah Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman, dan (2) Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976, (3) Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar, Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2. Oleh karena itu harta peninggalan yang sudah dihibahkan tersebut kembali kepada status quo dan sepenuhnya menjadi hak ahli waris sah, Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH., (cucu kandung) dari almarhum Dollah Oesman (kakek) dan almarhumah Sutinah (nenek), serta orang tua kandungnya, yaitu almarhum H. Aboe Bakar Oemar (ayah dan menantu dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah) dan almarhumah Nurani binti Dollah Oesman (ibu dan anak kandung dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah).

Keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru tersebut telah dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr tanggal 26 Juli 2007M dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan 568 K/AG/2008, yang pada pokoknya telah membatalkan

putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, dan menetapkan pemberian hibah kepada Aminah binti Radjiman, dengan pertimbangan: (1) objek gugatan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, (2) gugatan kabur, (3) kurangnya jumlah para penggugat, dan (4) penggugat tidak berkualitas; para Penggugat Konvensi telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Pandangan Hukum Islam terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Keputusan Mahkamah Agung RI tentang pemberian hibah kepada anak angkat telah sesuai dengan pandangan Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 dan Pasal 210-214 yang menyatakan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

ABSTRACT

This study was investigated the disputed provision of grants to adoption children in the Religious Court Class 1A Pekanbaru, on behalf of Aminah bint Rajiman located at Meranti Street Lasting Peace Housing Block AI Number 39, Pekanbaru, which is the adopted by Dollah Oesman and Sutinah deceased, had received a grant from the adoptive parents in the form of 1 unit home located on Teuku Umar Street 33 RT. 02 RW. 04 Selat Panjang Town, Bengkalis with broad M2 \pm 680, Certificate Number 313, on April 7th 1997 on behalf of Aminah bint Radjiman by Grant Deed Number 27 of 1967 on December 16th 1976 before the High Cliff Head Selat Panjang, Bengkalis.

Consideration of Religious Court Judge Pekanbaru with Decision Number 362/Pdt.G/2006/PA.Pbr July 26th 2007, in deciding cases grants that have been received by Aminah bint Rajiman is considered legally flawed, because: (1) there are differences in the number and date of the grant deed and Certificate Nounber 313, on April 7th 1997 on behalf of Aminah bint Radjiman, and (2) grant Deed No. 27 of 1967 on December 16th 1976, (3) Certificate of Land on behalf Nurbaya fuel, Reg. Number 09/SKT/KTT/2005 on September 27th 2005, with an area of \pm 866 m2. Therefore the treasures that have been donated are returned to the status quo and fully become the legitimate heir, Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH., (Grandson bladder) from the Dollah Oesman (grandfather) and Sutinah (grandmother), as well as the biological parents, the late H. Fuel Aboe Oemar (father and son of the deceased Dollah Oesman and Sutinah) and Dollah Oesman Conscience bint (the mother and the biological child of the deceased Dollah Oesman and Sutinah).

Decision of Religious Court Class 1A Pekanbaru has been canceled by the Decision of High Court Religious Riau Province Number 47/Pdt.G/2007 / PTA.Pbr July 26th 2007 and Indonesian Supreme Court decision ruling 568K/AG/2008, which essentially has Pekanbaru religious court decision canceling Number 362/Pdt.G/2006 / PA.Pbr, and establish grants to Aminah bint Radjiman, with consideration of: (1) the object of the lawsuit is beyond the jurisdiction of the Religious Court of Pekanbaru, (2) vague lawsuit, (3) the lack of the plaintiff, and (4) the plaintiff was not qualified; Convention the plaintiff had fabricated and not based on law.

The View of Islamic law to the Decision of High Court Religious Riau Province and the Supreme Court decision on awarding a grant to the adopted child in accordance with the Islamic law views as described in the Compilation of Islamic Law Article 209 and Article 210-214 stating that the grant of a parent to a child can calculated as a legacy. Grants can not be withdrawn, unless the grant parents to their children. Grants are awarded at the time of the grantor in a state hospital close to death, it must get approval from their heirs.

التجريد

هذه الدراسة	الربيب	شريعة بيكانبارو
نيابة عن أمينة راجيمان	ميرانتي	39 1 -
هو ابن	سوتينة	
1	تيوكو	04 -02 33
قرية سيلات	بانكالييس	313 680
بتاريخ 7 أبريل 1997 نيابة عن أمينة راجيمان	313	27 1967
16 ديسمبر 1976	سيلا	
رئيس	الدينية بيكانبارو	262\
ويعتبر	تاريخ 26 يوليو 2007 الميراث،	
تم استلامها	أمينة راجيمان معيبة	لأسباب التالية: (1) هناك
تاريخ وثيقة	الشهادة	313، بتاريخ 7 أبريل 1997 نيابة عن أمينة راجيمان (2)
27 1967	بتاريخ 16 ديسمبر 1976 (3) شهادة	
نوربايا ريج .	ريج .	09.\ 2005\ 27 2005
غ مساحتها 866 متر	يتم إرجاع	التبرع بها إلى الوضع الراهن
الوريث الشرعي	كمال الدين	حفيد
سوتينة		
شريعة بيكانبارو	العليا في	رياو الدينية
47\ . 2006\ -	26 يوليو 2007	المحكمة العليا الإندونيسية
568 \ 2008\	التي لديها	بيكانبارو الدينية
262\ . 200\ -	مينة راجيمان	النظر فيما يلي :
(1) هو خارج	الدينية في بيكانبارو (2)	
(3)	(4) لم يكن المدعي المؤهلين؛ اتفاقية	

عرض الشريعة الإسلامية على قرار المحكمة العليا الدينية مقاطعة رياو وقرار المحكمة العليا بشأن منح منحة للطفل المعتمدة وفقا للآراء الشريعة الإسلامية كما هو موضح في تجميع الشريعة الإسلامية المادة 209 210-214 تفيد أنه يمكن للمنحة من أحد الوالدين إلى الطفل تحسب باعتبارها إرثا. لا يمكن سحب المنح، لأطفالهم. ويتم منح المنح في وقت المانح في وثيقة مستشفى حكومي حتى الموت، يجب أن تحصل على موافقة من وراثتهم.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = ‘	ء = ‘
	غ = gh	ي = y

- Vokal Panjang (*mad*) \hat{a} = aa
- Vokal Panjang (*mad*) \hat{i} = ii
- Vokal Panjang (*mad*) \hat{u} = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i , misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أُو ditulis *uw*, أي ditulis *ay*, dan اي ditulis *iy*.

5. Ta' Marbutah

Ta' marbutah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميتة ditulis *al-maitatu*,

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslim*, الدار ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis *Abdullah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008).** Penelitian ini dipilih karena penulis melihat adanya perbedaan dalam hal pemberian hibah kepada anak angkat antara keputusan PA Pekanbaru, PTA Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI. Padahal, masing-masing lembaga pengadilan menggunakan sumber dan referensi hukum yang sama, yaitu Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdota dan peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengungkap sengketa pemberian hibah kepada anak angkat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, atas nama Aminah binti Rajiman yang beralamat di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A I No. 39, Pekanbaru, yang merupakan anak angkat dari Almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Sumber data primer: Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor : 362/Pdt.G/ 2006 /PA.Pbr, Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Pekanbaru Nomor : 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 568 K/AG/2008, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Analisis data menggunakan metode *Content Analysis* (Analisis Isi), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, lisan, tulisan dan lain sebagainya.

Hasil Penelitian : Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr Tanggal 26 Juli 2007 tentang Kewarisan, dalam memutuskan perkara pemberian hibah yang telah diterima oleh Aminah binti Rajiman dinilai cacat hukum, karena: (1)terdapat perbedaan nomor dan tanggal surat dan akta hibah Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman, dan (2) Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976, (3) Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar, Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2. Oleh karena itu harta peninggalan yang sudah dihibahkan tersebut kembali kepada status quo dan sepenuhnya menjadi hak ahli waris sah, Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH., (cucu kandung) dari almarhum Dollah Oesman (kakek) dan almarhumah Sutinah (nenek), serta orang tua kandungnya, yaitu almarhum H. Aboe Bakar Oemar (ayah dan menantu dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah) dan almarhumah Nurani binti Dollah Oesman (ibu dan anak kandung dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah).

Keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru tersebut telah dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr tanggal 26 Juli 2007M dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan 568 K/AG/2008, yang pada pokoknya telah membatalkan

putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, dan menetapkan pemberian hibah kepada Aminah binti Radjiman, dengan pertimbangan: (1) objek gugatan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, (2) gugatan kabur, (3) kurangnya jumlah para penggugat, dan (4) penggugat tidak berkualitas; para Penggugat Konvensi telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Pandangan Hukum Islam terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Keputusan Mahkamah Agung RI tentang pemberian hibah kepada anak angkat telah sesuai dengan pandangan Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 dan Pasal 210-214 yang menyatakan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

ABSTRACT

This study was investigated the disputed provision of grants to adoption children in the Religious Court Class 1A Pekanbaru, on behalf of Aminah bint Rajiman located at Meranti Street Lasting Peace Housing Block AI Number 39, Pekanbaru, which is the adopted by Dollah Oesman and Sutinah deceased, had received a grant from the adoptive parents in the form of 1 unit home located on Teuku Umar Street 33 RT. 02 RW. 04 Selat Panjang Town, Bengkalis with broad M2 \pm 680, Certificate Number 313, on April 7th 1997 on behalf of Aminah bint Radjiman by Grant Deed Number 27 of 1967 on December 16th 1976 before the High Cliff Head Selat Panjang, Bengkalis.

Consideration of Religious Court Judge Pekanbaru with Decision Number 362/Pdt.G/2006/PA.Pbr July 26th 2007, in deciding cases grants that have been received by Aminah bint Rajiman is considered legally flawed, because: (1) there are differences in the number and date of the grant deed and Certificate Nounber 313, on April 7th 1997 on behalf of Aminah bint Radjiman, and (2) grant Deed No. 27 of 1967 on December 16th 1976, (3) Certificate of Land on behalf Nurbaya fuel, Reg. Number 09/SKT/KTT/2005 on September 27th 2005, with an area of \pm 866 m2. Therefore the treasures that have been donated are returned to the status quo and fully become the legitimate heir, Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH., (Grandson bladder) from the Dollah Oesman (grandfather) and Sutinah (grandmother), as well as the biological parents, the late H. Fuel Aboe Oemar (father and son of the deceased Dollah Oesman and Sutinah) and Dollah Oesman Conscience bint (the mother and the biological child of the deceased Dollah Oesman and Sutinah).

Decision of Religious Court Class 1A Pekanbaru has been canceled by the Decision of High Court Religious Riau Province Number 47/Pdt.G/2007 / PTA.Pbr July 26th 2007 and Indonesian Supreme Court decision ruling 568K/AG/2008, which essentially has Pekanbaru religious court decision canceling Number 362/Pdt.G/2006 / PA.Pbr, and establish grants to Aminah bint Radjiman, with consideration of: (1) the object of the lawsuit is beyond the jurisdiction of the Religious Court of Pekanbaru, (2) vague lawsuit, (3) the lack of the plaintiff, and (4) the plaintiff was not qualified; Convention the plaintiff had fabricated and not based on law.

The View of Islamic law to the Decision of High Court Religious Riau Province and the Supreme Court decision on awarding a grant to the adopted child in accordance with the Islamic law views as described in the Compilation of Islamic Law Article 209 and Article 210-214 stating that the grant of a parent to a child can calculated as a legacy. Grants can not be withdrawn, unless the grant parents to their children. Grants are awarded at the time of the grantor in a state hospital close to death, it must get approval from their heirs.

التجريد

تفصح هذه الدراسة للكشف عن المنح نزاع الربيب في محكمة الشريعة ببيكانبارو، نيابة عن أمينة بنت راجيمان تقع في السارح ميرانتي السلام الدائم الإسكان بلوك ا-1 رقم 39، ببيكانبارو، الذي هو ابن اعتمدت المتوفى دواله عثمان وسوتينة المتوفى، وحصل على منحة من الآباء بالتبني في شكل 1 وحدة الوطن تقع على السارح تيوكو عمر رقم 33 رت 02-رو 04 قرية سيلات بانجانغ تاون، منطقة جرف عال، بانكالييس واسعة 680 ميتر، شهادة رقم 313، بتاريخ 7 أبريل 1997 نيابة عن أمينة بنت راجيمان بواسطة منحة سند رقم 27 لعام 1967 على 16 ديسمبر 1976 من قبل رئيس جرف عال سيلات بانجانغ.

ويعتبر النظر في المحكمة القاضي الدينية ببيكانبارو مع القرار رقم 262\ف دت.ج\200\ف أ-فكنبارو تاريخ 26 يوليو 2007 الميراث، في اتخاذ قرار منح الحالات التي تم استلامها من قبل أمينة بنت راجيمان معيبة قانونا، للأسباب التالية: (1) هناك اختلافات في عدد وتاريخ وثيقة المنحة والشهادة رقم 313، بتاريخ 7 أبريل 1997 نيابة عن أمينة بنت راجيمان، و (2) منحة سند رقم 27 لعام 1967 بتاريخ 16 ديسمبر 1976، (3) شهادة أرض باسم نوربايا الوقود، ريج. رقم 09\س ك ت\ك ت\2005\المؤرخة 27 سبتمبر 2005، حيث تبلغ مساحتها 866 ميتر وبالتالي يتم إرجاع الكنوز التي تم التبرع بها إلى الوضع الراهن، وأصبح الوريث الشرعي تاما، والدكتور الحاج. كمال الدين بكر، م ف ه،) المئانة حفيد المتوفى دواله عثمان وسوتينة فضلا عن الآباء.

القرار محكمة الشريعة ببيكانبارو من قبل المحكمة العليا في قرار مقاطعة رياو الدينية رقم 47\ف دت.ج\2006\ف ت أ-فكنبارو 26 يوليو 2007 و المحكمة العليا الإندونيسية قرار الحاكم رقم 568\ك أ\ج\2008، التي لديها أساسا ببيكانبارو قرار المحكمة الدينية إلغاء عدد 262\ف دت.ج\200\ف أ-فكنبارو، وإقامة منح لأمينة بنت راجيمان، مع النظر فيما يلي: (1) الغرض من الدعوى هو خارج اختصاص المحكمة الدينية في ببيكانبارو، (2) دعوى قضائية غامضة، (3) عدم وجود المدعي، و (4) لم يكن المدعي المؤهلين؛ اتفاقية المدعي قد ملفقة ولا تستند إلى القانون.

عرض الشريعة الإسلامية على قرار المحكمة العليا الدينية مقاطعة رياو وقرار المحكمة العليا بشأن منح منحة للطفل المعتمدة وفقا للآراء الشريعة الإسلامية كما هو موضح في تجميع الشريعة الإسلامية المادة 209 والمادة 210-214 تفيد أنه يمكن للمنحة من أحد الوالدين إلى الطفل تحسب باعتبارها إرثا. لا يمكن سحب المنح، إلا إذا كان الآباء منحة لأطفالهم. ويتم منح المنح في وقت المانح في وثيقة مستشفى حكومي حتى الموت، يجب أن تحصل على موافقة من ورثتهم.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = ‘	ء = ‘
	غ = gh	ي = y

- Vokal Panjang (*mad*) \hat{a} = aa
- Vokal Panjang (*mad*) \hat{i} = ii
- Vokal Panjang (*mad*) \hat{u} = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i , misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أُوْ ditulis *uw*, أيْ ditulis *ay*, dan ايْ ditulis *iy*.

5. Ta' Marbutah

Ta' marbutah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميتة ditulis *al-maitatu*,

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslim*, الدار ditulis *al-Dar*. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis *Abdullah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak dalam suatu perkawinan,¹ merupakan tujuan dan harapan yang sangat diidam-idamkan oleh pasangan suami isteri. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka

¹Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Difa Publisher, 2000), hlm. 211. secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Fiqh adalah “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.” Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, (Kairo : Dar al-Manar, 1990), hlm. 334. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai : “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, , *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hlm. 36. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’ . al-Syatibiy, *al-Muwafaqat.*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 220.

*beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni`mat Allah?" (QS. al-Nahl : 72).*²

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, di mana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat anak. Dalam konteks ini Soerjono Soekanto dan Soleman, menulis :

Pengangkatan anak di sini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena "Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai."³

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari tiga unsur, yaitu : seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang

²Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 1991), hlm. 372.

³Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; Rajawali, 1983), hlm. 275.

terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam suatu perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak sah, sebagaimana dalam pasal 42 Undang-undang ini dijelaskan :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku /dan tidak punah dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut adopsi. Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.⁴

Pengangkatan anak, dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam Bahasa Belanda, atau *adopt (adoption)* dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Adopsi jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.⁵ Secara terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang pengertian adopsi, antara

⁴Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1992), hlm. 7-8.

⁵*Ibid.*, hlm. 4.

lain Soerojo Wignjodipuro dalam bukunya *Pengantar dan Azas-azas Hukum*

Adat, memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

Pengangkatan anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁶

Adanya istilah anak angkat karena seseorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau anak perempuan.⁷ Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat, tapi hal ini hanya dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negara yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 dijelaskan :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.⁸

Dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Buku II Bab I, Pasal 171 huruf h, tentang anak angkat dijelaskan sebagai berikut:

⁶Soerjono Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 11.

⁷B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali,1993), hlm. 45.

⁸Mudris Zain, *op. cit.*, hlm. 5.

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 dijelaskan :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.¹⁰

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi

⁹Mudris Zain, *op. cit.*, hlm. 6.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 7.

dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mewalikan dan waris mewariskan.¹¹

Penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam Hukum Islam untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak *sulbu* artinya: anak kandung yang berasal dari *sumsum tulang sulbi* atau tulang punggung kamu. Dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. Selanjutnya dalam pandangan hukum Islam

¹¹Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta; Liberty, 1981), hlm 102.

pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.¹²

Dalam sejarah hukum Islam dikenal istilah “*tabanni*” yang berasal dari bahasa Arab, bermakna mengambil anak angkat atau menjadikan seseorang sebagai anak kandung. Tradisi pengangkatan anak konsepsi “*tabanni*” ini terjadi pada zaman sebelum Islam (jahiliah) dan awal Islam. Konsepsi pengangkatan anak tersebut mempunyai akibat hukum yang sama dengan konsepsi pengangkatan anak *Staatsblad* 1917-129, yaitu putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan anak kandung, nama anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya yang menunjukkan bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandungnya, serta berhak mewarisi.¹³ Tradisi pengangkatan anak dalam konsepsi yang demikian itu, kemudian dikoreksi syariat Islam yang mengharamkan tradisi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ahzāb ayat 4-5 sebagai berikut :

¹²M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta; Akademika Presindo, 1985), hlm. 24-25.

¹³*Ibid.*, hlm. 25.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
 اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
 ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4)
 ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أخطأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
 (5)

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab 4-5).¹⁴

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah tidak memutuskan hubungan darah, tidak mengubah status anak angkat menjadi sama dengan anak kandung, hubungan anak angkat yang bukan mahram orang tua angkatnya tetap bukan mahram, anak angkat tetap dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandungnya, dan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Meskipun dalam al-Qur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk dari berbagai

madzhab dalam Islam dan dijadikan salah satu sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Bab I, Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.¹⁵

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (1) dan (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan. Dengan demikian, untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat meeeujudkannya melalui wasiat sebagaimana dijelaskan di atas, dan juga dapat dilakukan melalui hibah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Bab I, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 211 sampai dengan Pasal 214, sebagai berikut :

¹⁴Tim Penterjemah Depag RI, *op. cit.*, hlm. 451.

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki, (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.¹⁶

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Di dalam Pasal 957 KUHPerdara disebutkan :

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.¹⁷

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, di beberapa daerah termasuk di Kota Pekanbaru telah banyak dilakukan, dan Pengadilan Agama telah memberikan penetapan yang sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak di kalangan hakim Peradilan Agama. Cara

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Presindo, 1995), hlm. 164.

pengangkatan anak seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru idealnya dilakukan dengan adanya persetujuan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, kemudian dilanjutkan ke kantor Lurah untuk dibuatkan surat pernyataan/perjanjian pengangkatan anak yang bermuara pada pengesahan yang dilakukan oleh Pengadilan. Bagi penduduk Muslim, pengesahan pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.¹⁸ Namun demikian, pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru justru lebih banyak dilakukan secara diam-diam dan cukup dilakukan secara kekeluargaan, tidak melalui Kelurahan dan tanpa pengesahan oleh pihak Pengadilan Agama. Padahal pengangkatan anak dengan cara demikian akan berakibat fatal, terutama akibat hukum pada pembagian warisan bagi anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal, dan tidak jarang dapat menimbulkan sengketa pembagian waris yang pada akhirnya bermuara pada penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹⁹ Buku II Bab I,

¹⁶*Ibid.*, hlm. 171-172.

¹⁷M. Budiarto, *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁸Amri, Panitera, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru Jl. Rawa Indah – Jl. Arifin Achmad Nomor 1 Pekanbaru. April 2012.

¹⁹Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan hukum material yang harus

Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Wasiat Wajibah, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 211 sampai dengan Pasal 214, tentang Hibah, dan Pasal 957 KUHPerdata tentang Hibah wasiat.¹⁸ Pada tahun 2006, Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru telah menyelesaikan kasus sengketa pembagian waris dan pemberian hibah kepada anak angkat, memeriksa dan memutuskannya, yaitu kasus sengketa pembagian waris dan pemberian hibah kepada anak angkat dengan Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr Tanggal 26 Juli 2007 tentang Kewarisan atas nama Aminah binti Radjiman, anak angkat dari almarhum almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, sebagai berikut :

1. Bahwa Aminah binti Radjiman sebagai Tergugat I, yang beralamat di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A I Nomor : 39 Pekanbaru, adalah anak angkat dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, telah menerima hibah berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas \pm 680 M2, Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman sebagai harta peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, dan telah

dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai 'mulut dari kompilasi' akan tetapi dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam berijtihad menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya sehingga peradilan Agama secara legalistik berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *Judicial Power* dalam negara hukum Republik Indonesia. Lihat Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 77. Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2004), hlm. 232.

¹⁸Amri, Panitera, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru Jl. Rawa Indah – Jl. Arifin Achmad Nomor 1 Pekanbaru. April 2012.

dihibahkan kepadanya, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976 di hadapan Camat Tebing Tinggi Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis.

2. Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH., Dr. (HC) Syamsiah Bakar binti Aboe Bakar Oemar, dan Nurbaya Bakar, mereka adalah cucu dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV, tidak mengakui keberadaan harta peninggalan tersebut sebagai hibah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar, Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru kemudian berpendapat bahwa hibah tersebut cacat hukum sehingga diputuskan bahwa harta tersebut kembali kepada status quo dan sepenuhnya menjadi hak dari para Penggugat.²⁰
3. Kasus pemberian hibah ini oleh Aminah binti Radjiman sebagai Tergugat kemudian dilanjutkan ke tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau membatalkan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2007/PTA.Pbr Tanggal 14 Mei 2008 tentang Kewarisan, yang menyatakan :

²⁰Sumber Data, *Dokumentasi*, Nomor Putusan : 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, Tanggal 26 Juli 2007 Tentang Kewarisan, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jl. Rawa Indah – Jl. Arifin Achmad No. 1 Pekanbaru.

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima,
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr Tanggal 26 Juli 2007 tanggal 26 Juli 2007M, bersamaan dengan tanggal 1 Rajab 1428 H : (1) Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat, (2) Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, (3) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.323.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- c. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).²¹

2. Oleh karena itu, kasus ini oleh Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH., dan Dr. (HC)

Syamsiah Bakar binti Aboe Bakar Oemar sebagai Penggugat dilanjutkan ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah Mahkamah Agung RI memeriksa, menimbang dan mengadili akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 568 K/AG/2008.²² Adapun pertimbangan Mahkamah Agung RI, dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

²¹Sumber Data, *Dokumentasi*, Nomor Putusan : 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr Tanggal 14 Mei 2008 tentang Kewarisan, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 198 Pekanbaru.

²²Sumber Data, *Dokumentasi*, Nomor Putusan : 568K/G/2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH bin Aboe Bakar Oemar tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.²³

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya kesenjangan yang perlu ditelusuri lebih mendalam, di mana dalam hal pemberian hibah kepada anak angkat antara keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat perbedaan. Padahal, dalam mengambil keputusan masing-masing lembaga pengadilan tersebut menggunakan sumber dan referensi hukum yang sama, yaitu Kompilasi Hukum Islam, KUHPdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan satu studi berjudul : **PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)**. Dengan memperhatikan

²³Sumber Data, *Dokumentasi*, Nomor Putusan : 568K/G/2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

kesenjangan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini sangat menarik untuk diteliti.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini jika diidentifikasi, mencakup :

- a. Bagaimana Hukum Islam mengatur pembagian harta warisan dan pemberian hibah kepada anak angkat?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dan pemberian hibah kepada anak angkat di lembaga peradilan : Pengadilan Agama Kelas 1A, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI?
- c. Mengapa terjadi perbedaan dalam menetapkan putusan tentang pembagian harta warisan pemberian hibah kepada angkat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang perbedaan dalam menetapkan putusan tentang pemberian hibah kepada anak angkat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat?
- b. Bagaimana Keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Keputusan Mahkamah RI Nomor : 568 K/AG/2008 membatalkan keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G /2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat?
- c. Apa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G /2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat?
- d. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008 membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Mengetahui secara lebih mendalam keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat,
2. Mengetahui secara lebih mendalam keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr tentang pembatalan pemberian hibah kepada anak angkat,
3. Mengetahui secara lebih mendalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI membatalkan keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr pemberian hibah kepada anak angkat,
4. Mengetahui secara lebih mendalam pandangan Hukum Islam terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008 tentang pemberian hibah kepada anak angkat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, selain sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam, hasil penelitian ini tentu diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya menambah wawasan dengan cara mengkritisi fenomena yang terjadi terkait kajian hukum Islam dan upaya menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

2. Bagi kalangan akademis dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai khazanah pengembangan ilmu dan wawasan keislaman khususnya dalam bidang hukum Islam.
3. Bagi Pemerintah dan para pembuat undang-undang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan keberlakuan Kompilasi Hukum Islam.

E. Studi Kepustakaan

Penelitian ini mengkaji tentang pemberian hibah kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ; studi analisis terhadap keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor : 362/Pdt.G/ 2006 /PA.Pbr), dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat? (2) Bagaimana Keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Keputusan Mahkamah RI Nomor : 568 K/AG/2008 membatalkan keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G /2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat? (3) Apa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G /2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat? dan (4) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008 membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr tentang pemberian hibah kepada anak angkat?

Berikut ini ada beberapa penelitian relevan yang perlu dikemukakan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Syaikh Abdullah, *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2001, berjudul *Peran Aktif Hakim Dalam Penyelesaian Hak Waris Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kota Pasuruan)*. Penelitian ini mengungkap bagaimana seorang hakim berperanan penting dalam penyelesaian perkara pembagian waris bagi anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pasuruan. Dari segi objek yang diteliti, penelitian ini hanya difokuskan pada satu lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama Pasuruan, sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih satu objek yang diteliti yaitu Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI. Dari segi subjek yang diteliti, penelitian ini juga hanya meneliti tentang peran aktif hakim dalam penyelesaian hak waris anak angkat. Sementara penelitian yang dilakukan penulis pada putusan yang telah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI.

Penelitian kedua dilakukan oleh Pahrerozi Suhastra, *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2003, berjudul *Hibah Sebagai Cara Untuk Menyiasati Pembagian Harta Waris (Studi di Desa Randuangung Kecamatan Singosari Malang)*. Penelitian ini

mengungkap bagaimana pembagian harta waris dilakukan dengan cara menghibahkan harta waris tersebut di Desa Randuangung Kecamatan Singosari Malang. Dari segi objek yang diteliti, penelitian ini hanya difokuskan pada satu objek penelitian yaitu di Desa Randuangung Kecamatan Singosari Malang, sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih satu objek yang diteliti yaitu Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI. Dari segi subjek yang diteliti, penelitian ini juga hanya meneliti tentang hibah sebagai cara menyiasati pembagian harta waris. Sementara penelitian yang dilakukan penulis meneliti perbedaan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI tentang pemberian hibah kepada anak angkat.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Inda Najah, *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2003, berjudul *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Kewarisan Antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata*. Penelitian ini mengungkap perbandingan tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Islam, KHI dan Hukum Perdata, di mana terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian ini merupakan studi komperatif tentang pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam kewarisan antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata, terdapat kesamaan sebagai studi komperatif, akan tetapi berbeda karena penulis meneliti perbedaan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,

Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI tentang pemberian hibah kepada anak angkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah analisis,²⁴ menggunakan metode *Content Analysis* (Analisis Isi),²⁵ yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, lisan, tulisan dan lain sebagainya,²⁶ atau “Suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.”²⁷

2. Sumber Data

Adapun data yang diambil dalam penelitian ini dari segi sumbernya dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu :

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

²⁵Klaus Krippendorff, *Content Analysis ; Introductions ti It's Theory and Methodologi (Analisis Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi)*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1991), hlm. 15.

²⁶Suharsimi Arkunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 321. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, (Jakarta : Rake Sarasin, 2000), hlm. 68.

²⁷Klaus Krippendorff, *op. cit.*, hlm. 16.

- a. Data primer, yang menjadi data primer dalam penelitian ini mencakup :
Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor : 362/Pdt.G/ 2006 /PA.Pbr, Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Pekanbaru Nomor : 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 568 K/AG/2008, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Data sekunder diambil dari buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini, terutama tentang pemberian hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas mengenai pemberian hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Untuk melengkapi data, selain diperoleh melalui sumber kepustakaan (Studi Dokumentasi), pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan yang pihak-pihak terkait dengan subjek dan objek yang diteliti, dalam hal ini Hakim dan Panitera bidang Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya, diuraikan dengan fakta yang ditemukan, kemudian

dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisis secara cermat dengan menggunakan metode *Content Analysis* (Analisis Isi), analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana semua teknik penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Teisis ini disusun dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan pembahasan, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang mencakup pembahasan : latar belakang masalah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori, yang mencakup pembahasan : pengangkatan anak, anak angkat, tujuan dan alasannya, dasar hukum pengangkatan anak dan perkembangannya di Indonesia, prosedur pengangkatan anak di Indonesia, dan pengangkatan anak dalam tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam serta akibat hukumnya.

Bab III Tinjauan tentang Kompilasi Hukum Islam, mencakup pembahasan : sejarah dan latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam,

²⁸Suharsimi Arikunto, *loc. cit.*

dinamika regulasi Kompilasi Hukum Islam, institusi (organisasi) pelaksana dan pengawas penerapan Kompilasi Hukum Islam, dan sistematika, isi dan kandungan Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup : keputusan Pengadilan Agama Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr dan Pengadilan Tinggi Kota Pekanbaru Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr tentang pemberian hak waris anak angkat, pertimbangan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Kota Pekanbaru tentang pemberian hak waris anak angkat tersebut, dan pandangan Hukum Islam terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008 tentang pemberian hak waris anak angkat.

Bab V Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengangkatan Anak di Indonesia

1. Pengertian Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Tujuan dan Alasan

Istilah yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia yang identik dengan pengangkatan anak atau anak angkat adalah *adopsi*. Secara etimologi, *adopsi* berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *adopt* (*adoption*) dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan. seorang anak untuk dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Adopsi jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.¹

Dengan demikian, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.² Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan status hukum Anak, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
- b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan

¹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1992), hlm. 4.

²Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 36.

mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.³

Soerojo Wignjodipuro dalam bukunya *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, memberikan batasan-batasan sebagai berikut ;

Pengangkatan anak (Adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴

Munculnya istilah anak angkat adalah karena seseorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau anak perempuan. Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat, tapi hal ini hanya dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negara yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan. Menurut *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 171 huruf h disebutkan :

³Azhar Basyir, *Adopsi dan Status Hukumnya*, dalam *www. google. com*, Dikases Tanggal 16 Maret 2012.

⁴Soerjono Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 11.

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 menjelaskan bahwa anak angkat adalah:

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.⁶

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabatnya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di samping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak termasuk juga anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Presindo, 1995), hlm. 163.

⁶Mudris Zain, *op. cit.*, hlm. 6.

dilaksanakan oleh seorang anak antara lain menghormati orang tua, wali dan masyarakat.

Defenisi anak angkat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan beberapa istilah tentang anak dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Dalam Pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah dimaksud yaitu anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara defenitif. Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/ atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/ atau bakat istimewa (Pasal 1 angka 8).⁷

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Menurut Soehino :

⁷Ahmad Kamil, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Timta Mas, 2008), hlm. 20.

Hukum adalah keadilan (*iustitia*) atau *ius/recht* (dari *regere*/memimpin), maka hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Undang-undang berasal dari kata *lege/wet* merupakan suatu nama yang digunakan untuk memenuhi tuntutan secara tertulis. Peraturan hukum adalah memberikan tata tertib dan menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat tetap dipelihara sebaik-baiknya dengan harapan setiap warga taat mematuhi peraturan hukum yang berlaku.⁸

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga karena menyangkut kepentingan perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (*adopsi*) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

B. Ter Haar sebagaimana dikutip Hasballah Thaib, menyatakan beberapa alasan dari perbuatan pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain : (1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*fear of extinction of a family*), dan (2) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*fear of dying childless and so suffering the extinction of the line of the descent*).⁹ Menurut Hasballah Thaib ada beberapa alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak di antaranya:

⁸Soehino, *Ilmu Negara; Statu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm. 24.

⁹M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Mataram : Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995), hlm. 109.

- b. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
- c. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang menganut system pengabdian kepada leluhur (*voor ouder verering*).
- d. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.
- e. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
- f. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
- g. Untuk memberikan kepuasan bathiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.¹⁰

Sementara itu, Santi Deliyana mengemukakan yang menjadi alasan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Ingin mempunyai keturunan atau ahli waris.
- b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya karena sunyi dan kesepian.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 110.

- c. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihan terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidupnya sesuai dengan batas kemampuannya.
- d. Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak.
- e. Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk pihak tertentu.¹¹

Di lain pihak, Djaja S Meliala mengatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah:

- a. Adanya belas kasihan terhadap anak yang terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- b. Tidak ada anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak di hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan memperoleh anak sendiri.
- d. Untuk menambah/untuk mendapatkan tenaga kerja.
- h. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan sekaligus untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.
- i. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.¹²

¹¹Santi Deliyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 29

¹²Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1999), hlm. 4.

2. Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengangkatan Anak

Pengamatan Mahkamah Agung memberikan suatu pendapat bahwa permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian bertambah. Baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran dan variasi-variasi pada motivasinya.¹³ Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak ditengah-tengah masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.¹⁴

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang harus mengacu kepada hukum terapan. Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaannya. Namun ada beberapa

¹³Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 29.

peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak,¹⁵ antara lain :

- a. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPPerdata/BW yang ada, khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 17 April 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hokum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- e. Bab VIII Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai tanggal 8 Februari 2005.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 29-30.

- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- i. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Dalam *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (BW) tidak mengenal satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi), yang ada hanyalah pengaturan tentang pengakuan anak diluar kawin seperti yang diatur dalam buku I Bab XII bagian ketiga yaitu Pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.¹⁶ Ketentuan ini dapat dikatakan tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak. Terhadap kepentingan seorang anak,

¹⁶*Ibid.*, hlm. 30.

pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan oleh wanita yang melahirkan anak tersebut atau pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang akan diakui dengan persetujuan wanita yang melahirkan anak tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 281 KUH Perdata tentang pengakuan anak sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya tetapi seorang perempuan atau laki-laki lain yang sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak tersebut dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum.¹⁷

Lembaga pengangkatan anak telah menjadi bagian budaya masyarakat pada saat itu dan telah menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi yaitu dengan diberlakukannya Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang pengangkatan anak. Khusus Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak bagi golongan masyarakat Tionghoa, namun pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, untuk masyarakat Indonesia yang berlaku adalah hukum adat yang termasuk didalamnya ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini perlu juga menyinggung masalah golongan penduduk di Indonesia sehubungan dengan masalah pengangkatan anak yang sudah berlaku pada masa Hindia Belanda sebelum

¹⁷*Ibid.*, hlm. 31.

Indonesia merdeka tahun 1945 yaitu berdasarkan Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda atau *Indische Staatsregeling* (I.S) Tahun 1927 Pasal 163 ayat (1) bahwa penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk, yaitu :

- a. Golongan Eropah, termasuk didalamnya : a. Bangsa Belanda, b. Bukan bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropah, c. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan), d. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan), e. Keturunan mereka yang tersebut di atas.
- b. Golongan Timur Asing, meliputi : a. Golongan Cina (Tionghoa), b. Golongan Timur Asing bukan Cina (Arab, India, Pakistan, Mesir dan sebagainya)
- c. Golongan Bumi Putera yaitu: a. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya, b. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.¹⁸

Adapun hubungan hukum antara golongan dan hukum yang berlaku adalah : (1) Bagi WNI yang berasal dari golongan Eropah namun peraturan hukum yang berlaku disesuaikan (konkordansi) dengan KUH Perdata dan KUH Dagang yang berlaku di negara Belanda (KUHP Perdata dan KUH Dagang di Indonesia), (2) Bagi orang asing di Indonesia yang berasal dari golongan Eropah

¹⁸Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 90.

berlaku KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Eropah, dan (3) Bagi warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing. Golongan Cina berdasarkan Staatsblad 1924 Nomor 557 berlaku KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia, dengan dikecualikan peraturan-peraturan tentang : (1) Pencatatan sipil (kini hanya satu catatan sipil untuk semua warga negara Indonesia), dan (2) Cara-cara perkawinan. Ditambah dengan peraturan-peraturan tentang : (1) Pengangkatan anak (adopsi), dan (2) Kongsi (kongsi disamakan dengan firma dalam KUH Dagang). Sementara golongan bukan Cina, berdasarkan Staatsblad Tahun 1924 Nomor 556 berlaku KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia dengan dikecualikan beberapa hal, yaitu : (1) Hukum kekeluargaan, dan (2) Hukum waris tanpa wasiat atau Hukum waris menurut undang-undang atau Hukum waris ab *instato*. Bagi orang asing di Indonesia yang berasal dari golongan Timur asing berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Timur Asing yang berlaku di negaranya masing-masing. Bagi warga negara Indonesia asli berlaku hukum Perdata adat (Hukum Adat).¹⁹

Ketentuan Hukum Perdata BW tidak mengatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak namun di beberapa pasal menjelaskan masalah warisan dengan istilah anak luar kawin atau anak yang diakui (*Erkend kind*). Oleh karena itu, bagi golongan Tionghoa diadakan peraturan tentang lembaga pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang dalam

¹⁹*Ibid.*, hlm. 91.

Bab II Pasal 5 ayat 1 menyatakan apabila seorang anak laki-laki yang beristri atau pernah beristri tidak mempunyai keturunan karena darah maupun karena pengangkatan maka dapatlah ia mengangkat seorang sebagai anak laki-lakinya sedangkan untuk golongan bumi putra berlaku hukum adatnya masing-masing.²⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 907/Pdt.P/1963 tertanggal 29 Mei 1963 tentang Pengangkatan Anak Perempuan Keturunan Tionghoa oleh Masyarakat Keturunan Tionghoa Sah. Dalam mengambil keputusan hakim tanpa ragu-ragu lagi untuk menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh peraturan pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berarti bahwa permohonan pengangkatan anak bagi golongan keturunan Tionghoa tidak terbatas pada anak laki-laki saja tetapi dibenarkan seorang anak perempuan bagi golongan Tionghoa untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh golongan Tionghoa sepanjang tidak melukai hukum adat masyarakat Tionghoa. Masyarakat hukum adat tionghoa mengenal pengangkatan anak perempuan, karena masyarakat Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa telah lama meninggalkan sifat patrilineal serta penghormatan nenek moyang sehingga sekarang lebih bercorak parental. Pandangan ini telah selaras dengan semangat perjuangan persamaan hak antara pria dan wanita.²¹ Mengenai permohonan adopsi tersebut maka berdasarkan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 163 IS memberi

²⁰*Ibid.*, hlm. 200.

²¹*Ibid.*, hlm. 201.

penjelasan bahwa hakim dalam kedudukannya sebagai pelaksana hukum dalam masa peralihan bukan saja mempunyai kewenangan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menguji dan menyatakan peraturan-peraturan manakah yang perlu dipertahankan dan mana yang tidak sesuai lagi dengan aliran zaman.²²

Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan tentang pengangkatan Anak (*Adopsi*) untuk golongan Tionghoa seperti tercantum dalam Pasal 5 dan seterusnya dari S. 1917 Nomor 129 sudah tidak berlaku lagi.²³ Dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat pada peraturan adopsi S. 1917 Nomor 129, dan berarti tidak lagi terbatas pada anak laki-laki saja melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja. Hal itu dikenal oleh Hukum adat Tionghoa.²⁴ Konsep pengangkatan anak menurut golongan Cina (Tionghoa) terletak kepada kenyataan bahwa adopsi bukanlah suatu kewajiban tetapi suatu hak yang dapat dilakukan oleh pihak laki-laki menurut hukum *kebapakan*, tetapi juga oleh suami istri dibenarkan mengambil seorang anak laki-laki atau perempuan untuk dijadikan anak angkatnya dan anak angkat itu tidak perlu mempunyai *clan* yang sama dengan yang mengambilnya. Terhadap anak yang tidak sah dapat diangkat menjadi anak angkat dan dapat mempergunakan suku dari bapak angkatnya.

²²*Ibid.*, hlm. 80.

²³*Ibid.*, hlm. 81.

²⁴Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 82.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 14 menyatakan suatu pengangkatan anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya akibatnya anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung dari orang tua angkat. Perihal aspek motivasi dari calon orang tua angkat yang memihak kepada masa depan anak tidak dikemukakan secara konkret dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 ini hanya sebagai pedoman pelaksanaan bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan dengan Pasal 15 ayat (2) mengemukakan:

Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kalimantan Tengah tanggal 27 Mei 1973 Pdt. Mtw, yang menyatakan bahwa untuk dapat dikabulkan permohonan pengangkatan anak diperlukan adanya surat penyerahan dari orang tua, saksi-saksi dan dikuatkan di pengadilan.²⁵

3. Prosedur dan Tata cara Pengangkatan Anak

Hasil penelusuran Mahkamah Agung RI yang menemukan adanya fakta-fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan dinilai belum mencukupi sehingga oleh Mahkamah Agung

²⁵*Ibid.*, hlm. 134.

menganggap masih perlu mengeluarkan surat edaran untuk menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur tentang tata cara dan pemenuhan syarat-syarat pada saat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Selain hukum acara perdata yang berlaku terhadap tata cara dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak.²⁶ Prosedur pengangkatan anak baik antar WNI atau antar WNI dan WNA akan dijelaskan lebih lanjut lagi Bentuk permohonan secara tulisan dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya dengan dibubuhi meterai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.

Dalam kaitannya dengan prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Syarat Dan Bentuk Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Surat permohonan bersifat voluntair.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai misalnya ada ketentuan undang-undangnya.

²⁶Lihat *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.*

- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon.²⁷

Untuk setiap proses pemeriksaan, pemohon harus membawa dua orang saksi yang mengetahui asal usul pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi harus mengetahui secara betul keadaan pemohon baik secara moril maupun materil dan memastikan bahwa pemohon betul-betul akan memelihara anak tersebut dengan baik.

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/ atau kepentingan

²⁷*Ibid.*, hlm. 9.

calon anak angkat didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. tanpa ditambahkan permintaan lain seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari B.”²⁸

Putusan yang dimintakan kepada pengadilan bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan pengangkatan anak. Mengingat bahwa pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut maka pemohon perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik termasuk mempersiapkan bukti-bukti yang berhubungan dengan kemampuan financial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan pemohon dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut dapat berupa slip gaji, surat kepemilikan rumah, deposito dan sebagainya.²⁹

Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan antara lain:

²⁸*Ibid.*, hlm. 13.

²⁹*Ibid.*, hlm. 14.

- 1) Surat-surat resmi tentang kelahiran yang berupa akte kelahiran atau akte kenal lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berizin Departemen Sosial.
- 2) Akte-akte, surat resmi pejabat lain yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
- 3) Akte Notaris, surat-surat di bawah tangan.
- 4) Surat-surat keterangan, laporan sosial dan pernyataan-pernyataan.
- 5) Surat keterangan dari kepolosian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.³⁰

Sehubungan dengan poin 3 di atas, eksistensi dari akte Notaris tentang pengangkatan anak (adopsi) setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam akte tersebut dimana penghadap adalah orang tua kandung dalam hal ini suami istri dan calon orang tua angkat di mana dalam akte tersebut isinya menyebutkan pernyataan pengangkatan anak (*adopsi*) dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Maka perlu ditambahkan dalam akte tersebut klausule tentang pernyataan kuasa yang diberikan oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk mengurus permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dan pernyataan bahwa orang tua angkat akan memperlakukan anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan menjadikan anak angkat tersebut menjadi ahli waris.

³⁰*Ibid.*

c. Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI

Adapun syarat-syarat permohonan pengangkatan anak antar WNI, sebagai berikut :

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon, berlaku ketentuan :
 - (a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan, (b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan,³¹ (c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 2) Syarat bagi calon anak angkat anatara lain : (a) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan anak, (b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut telah diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

4. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak, mencakup :

³¹Lihat *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 39 ayat (3).

a. Pasangan Suami Istri

Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah orang tua angkat berstatus kawin pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah menikah selama lima tahun. Keputusan ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial.³²

b. Orang Tua Tunggal

Staatsblad 1917 Nomor 129 ; Staatsblad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan yang terkait perkawinan juga bagi yang pernah terkait dalam perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak maka istrinya itu tidak dapat melakukannya. Pengangkatan anak menurut staatsblad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan akta Notaris. Namun berdasarkan yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tanggal 29 Mei 1963 telah membolehkan mengangkat anak perempuan. Bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat pada peraturan adopsi S. 1917 – 129, berarti tidak lagi terbatas pada anak laki-laki saja melainkan juga dapat

³²Lihat Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum adat Tionghoa.³³

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 ; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Isinya selain menetapkan pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).³⁴ Apabila seseorang belum menikah atau memutuskan untuk tidak menikah dan ingin mengangkat anak maka ketentuan ini memungkinkan untuk melakukannya. Setelah permohonan disetujui oleh pengadilan, pemohon akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengangkatan anak. Salinan yang diperoleh harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte kelahiran tersebut akan dinyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat/diadopsi dan disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya. Konsekuensi dari pencatatan akte kelahiran anak di kantor pencatatan sipil berimplementasi terhadap hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya.

³³Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, op. cit., hlm. 82.

³⁴Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 ; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

5. Pencatatan Anak di Kantor Catatan Sipil

Akte kelahiran adalah akte yang termasuk di dalam akte catatan sipil, dimana akte catatan sipil adalah akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian dan akte pengakuan/pengesahan anak oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan akte catatan sipil adalah surat/catatan resmi yang dibuat oleh pejabat Negara yakni pejabat catatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi dalam keluarga yang didaftarkan oleh Kantor catatan sipil seperti peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan/pengesahan anak.³⁵

Sehubungan dengan pengangkatan anak maka setelah permohonan pengangkatan anak disetujui oleh pengadilan, pemohon akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengangkatan anak. Salinan yang diperoleh harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte kelahiran tersebut akan dinyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat/diadopsi dan disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Dalam hal ini ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pasal 23 ayat (1), Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-

³⁵Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika 1991), hlm. 68.

undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat dengan melampirkan data penetapan pengadilan negeri (atau pengadilan agama bagi yang beragama Islam) tentang pengangkatan anak, akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dokumen imigrasi bagi WNA. Ayat (2). Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pasal 24. Pelaporan pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat setelah kembali ke Indonesia.³⁶

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditinjaklanjuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan adat kebiasaan setempat.

³⁶*Ibid.*, hlm. 69.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak baik yang dilakukan pemerintah maupun oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam Pasal 1 angka (2) dijelaskan tentang pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³⁷

³⁷Lihat *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Angka (1) dan (2).

Selanjutnya, dijelaskan juga pengertian orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu : (1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan (2) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.³⁸

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi: pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan berdasarkan perundangundangan. Terhadap pengangkatan anak yang berdasarkan adat kebiasaan setempat dimaksudkan adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk pengangkatan anak ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Adapun pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup : (a) pengangkatan anak secara langsung yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung dan dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan (b) pengangkatan anak melalui

³⁸Victor Situmorang, *op. cit.*, hlm. 70.

pengasuhan anak yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri dan pengangkatannya dilakukan melalui penetapan pengadilan.³⁹ Adapun syarat pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah ini adalah : 1). Terhadap anak yang akan diangkat meliputi : a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, b. Merupakan anak telantar atau ditelantarkan, c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan d. Memerlukan perlindungan khusus, dan 2). Berdasarkan usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama, b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak. c. Anak berusia 12 tahun sampai sebelum 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁴⁰

Yang dimaksud dengan sepanjang ada alasan mendesak adalah seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun yang dimaksudkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penculikan dan perdagangan, anak

³⁹*Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁰*Ibid.*

korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat, antara lain: a. sehat jasmanai dan rohani, b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, c. beragama sama dengan agama calon anak angkat, d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun, f. tidak merupakan pasangan sejenis, g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, k. adanya laporan dari pekerja sosial setempat, l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan m. memperoleh izin dari Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁴¹

Selanjutnya dalam Bab IV, mengatur tentang tata cara pengangkatan anak. Pada bagian pertama mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi: a. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan, b. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan di ajukan

⁴¹*Ibid.*, hlm. 72.

ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, c. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait, d. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 kali dengan jarak waktu paling singkat 2 tahun, dan e. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.⁴²

Bagian kedua dari Bab IV mengenai tata cara pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, antara lain :

(1) permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan untuk mendapatkan putusan pengadilan, (2) pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait yaitu Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri. Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, (3) permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis setelah memenuhi persyaratanpersyaratan, dan (4) pengangkatan anak WNI yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh WNA yang berada di

⁴²*Ibid.*, hlm. 72.

luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dengan memenuhi persyaratan-persyaratan.⁴³

Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan perizinan Pengangkatan Anak yaitu Tima yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait. Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan sedangkan pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dilaksanakan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran anak serta memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

B. Pengangkatan Anak Dalam Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Pengangkatan Anak Dalam Tinjauan Hukum Adat

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat maka dia akan didudukkan dan diterima dalam posisi yang dipersamakan, baik secara biologis maupun sosial

⁴³*Ibid.*, hlm. 73.

yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Bushar Muhammad, menyatakan :

“.....Bahwa dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang mempengaruhi pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis dan tertentu dalam kedudukan sosialnya, sebagai contoh dapat disebutkan kawin ambil anak atau *inlijfhuwelijk*. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan yaitu: a. sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis), dan b. sebagai anggota masyarakat (sosial) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai.”⁴⁴

Pendapat B. Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan. Pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat dapat dilakukan dengan cara: a. Tunai/kontan artinya bahwa anak tersebut dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang dan/atau pakaian, dan b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala kesukuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial. Benda-benda materiil misalnya rumah, sawah, kebun dan sebagainya sedangkan

⁴⁴Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Yakarta : Pradnya Paramita, 1981), hlm. 29.

yang termasuk harta benda immaterial misalnya gelar adat, kedudukan adatnya dan martabat keturunan. Khusus masalah pengangkatan anak mempunyai sifat yang sama antara berbagai daerah hukum meskipun karakteristik dari masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan cultural suku bangsa Indonesia, antara lain :

- a. Tidak ada ketentuan tentang batas umur dan siapa saja yang boleh mengangkat anak. Hal ini berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hukum adat yang berlaku di beberapa daerah.
- b. Pada umumnya di dalam masyarakat adat Indonesia tidak membedakan antara anak laki-laki atau perempuan kecuali beberapa daerah yang masyarakatnya menganut garis keturunan laki-laki (*patrilineal*)
- c. Sehubungan dengan umur anak untuk dijadikan sebagai anak angkat adalah berbeda-beda.
- d. Pengangkatan anak pada masyarakat adat berbeda-beda dapat dilakukan terhadap keluarga dekat, luar keluarga atau orang asing.
- e. Pengangkatan anak harus terang maksudnya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.⁴⁵

Surojo Wignodipuro,⁴⁶ menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang artinya wajib dilakukan dengan upacara adat dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat sama dengan anak kandung dari pada

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 30

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 31.

suami istri yang mengangkatnya sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus seperti yang dikenal di daerah Gayo, Lampung, Nias dan Kalimantan. Adapun kekuatan hukum pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri antara lain pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 516 K/Sip/1968, menurut hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya memperoleh hadiah atau hibah dari orang tua angkat selagi hidup.

2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam dan Akibat Hukumnya

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*Adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.” Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang berarti “mengambil anak angkat.”⁴⁷

Secara terminologi, *tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di-*nasab*-kan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabbani* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-*nasab*-kan seorang anak

⁴⁷Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo : Maktabah Dar al-Salam, 2007), Jilid IV, hlm. 223.

kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya *nasab* yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian yang demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur me-*nasab*-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan *nasab*-nya harus dibatalkan. Pengangkatan anak (*adopsi, tabanni*) yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat.”⁴⁸ Peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak” dan istilah terakhir yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam mengenal juga istilah *nasab* (keturunan karena pertalian darah) yang tidak boleh dihilangkan dari orang tua kandungnya. Nasab anak angkat tetaplah mengacu kepada ayah kandungnya. Zaid tidak dipanggil dengan Zaid bin Muhammad tetapi Zaid bin Haritsah.⁴⁹ Jadi, dalam Islam tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya.

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak juga menyebutkan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) ditegaskan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 224.

Hukum Islam tidak membolehkan pemeluknya untuk melakukan pengangkatan anak yang dinasabkan kepada dirinya, tetapi hukum Islam memperhatikan nasib anak terlantar, baik karena ditinggal mati orang tuanya (yatim), cerai maupun karena keadaan rendahnya ekonomi keluarga. Dalam keadaan demikian, Islam memerintahkan umatnya untuk menyantuni mereka dengan jalan memelihara dan mendidiknya sehingga anak tersebut kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Pemeliharaan tersebut bukan seperti pada anak angkat tetapi pemeliharaan itu didasarkan pada perikemanusiaan, cinta kasih dan kasih sayang, tanpa menetapkan hak-hak kepada yang menyebabkan ia muhrim dengan orang yang memeliharanya dan anak-anak kandungnya, dan tidak menetapkan kepadanya untuk menerima harta warisan sebagai mana anak kandung dan demikian juga hukum-hukum yang lain.⁵⁰

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.⁵¹ Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan

⁵⁰Zakaria Ahmad al-Barri, *Ahkamu al-Aulad Fiy al-Islam*, (Cairo, Daru al-Qaumiyyah, 2000), hlm. 24.

⁵¹Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 12.

tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Ahzab 4-5 :

لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ
الَّذِيْ يُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ (4)
دَعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا (5)

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab 4-5).⁵²

Namun demikian, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak

⁵²Tim Penterjemah Depag RI, *op. cit.*, hlm. 451.

yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.

Dengan demikian jelas bahwa hukum Islam melarang terhadap perbuatan hukum pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung. Menurut Pasal 171 huruf h *Kompilasi Hukum Islam* dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁵³

Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya hukum Islam telah menetapkan adanya ahli waris yang jika memenuhi syarat dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal (pewaris). Di antaranya adalah anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak di sini

⁵³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Presindo, 1995), hlm. 170.

adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir dari luar nikah (zina). Menurut Yusuf al-Qardawi, dalam masalah warisan, menulis :

Anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh al Qur'an dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan. dan dalam perkawinan, Allah telah berfirman dalam QS. al-Nisa' Ayat (23) :*bahwa di antara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah janda anak kandung, bukan janda dari anak angkat.*⁵⁴

Menurut hukum formal dalam Islam di Indonesia, pengangkatan anak mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf h menjelaskan pengertian tentang anak angkat sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan hak waris anak angkat berdasarkan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI yaitu anak angkat dan orang tua angkat masing-masing mendapat harta warisan berupa wasiat wajibah. Jika anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkat secara otomatis berhak mendapatkan harta warisan dari anak angkat tersebut.

Sebaliknya, jika orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat berhak juga mendapat wasiat wajibah dari harta warisan tersebut. Wasiat wajibah adalah di mana seseorang dalam hal ini baik anak angkat maupun orang tua angkat hanya mendapat 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya maupun orang tua angkatnya. Namun lebih lanjut dijelaskan oleh wakil ketua Mahkamah

⁵⁴Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), Jilid I dan II, hlm. 303.

Syariah Banda Aceh, Drs. Salahuddin Mahmud,⁵⁵ anak angkat tidak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya secara *faraidh* karena didasari pada pertimbangan bahwa seluruh keperluan dan kebutuhan anak angkat telah dipenuhi dan diurus oleh orang tua angkatnya sehingga anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah. Jika dalam pembagian wasiat wajibah ini, ahli waris dari orang tua angkatnya keberatan dengan wasiat wajibah ini, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Karena itu menurutnya, penting dibuatkan wasiat sebelum ayah angkatnya meninggal dunia.

Dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk pengesahan anak angkat ke Mahkamah Syariah, syarat-syarat yang diajukan pemohon harus mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 bahwa pengesahan atau pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia harus memperhatikan : (1) Syarat dan bentuk surat permohonan yang diajukan, dan (2) Isi surat permohonan, menyebutkan dasar (motif) yang mendorong diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut. Hal lain juga harus menunjukkan bahwa permohonan pengesahan/ pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan si anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan hari depan anak setelah pengangkatan anak terjadi.

⁵⁵Salahuddin Mahmud, dalam [http:// www.idlo.int/bandaacehawareness.htm](http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm), tanggal 27 September 2012.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon orang tua angkat atau pemohon adalah : (1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan, (2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/ belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan. Sementara syarat yang harus dipenuhi calon anak angkat adalah : (1) Jika anak yang akan diangkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, dan (2) Calon anak yang akan diangkat harus juga mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam pengangkatan anak harus dilengkapi dengan : (1) Surat persetujuan dari orang tua kandung tentang pengangkatan anak tersebut, (2) Fotocopi KTP pemohon, (3) Fotocopi buku nikah, (4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian, (5) Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari dokter, (6) Surat keterangan yang menyebutkan kemampuan ekonomi calon orang tua angkat, biasanya surat ini dikeluarkan oleh kepala desa setempat dan mampu atau tidaknya akan dibuktikan dalam persidangan, (7) Akte kelahiran anak, dan (8) Menghadirkan saksi (minimal dua orang saksi). Ditambahkan, penting untuk diingat bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkat. Hal itu juga diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan

calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

C. Hibah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Hibah dan Wasiat

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan yang memberi kepada tangan orang yang diberi.⁵⁶ Jika diperhatikan dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *washshaitu asy-syaia, ushi* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa Indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu.”⁵⁷ Menurut Prof. Hazairin:

Selain dari hibah atau penghibahan menurut adat itu, ada pula perbuatan si pemilik di masa hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan di hadapan para calon ahli warisnya dan di hadapan anggota-anggota keluarga lainnya bahwa suatu barang tertentu kelak sesudah matinya diperuntukkan untuk seorang ahli waris tertentu atau seorang tertentu yang sekali-kali bukan ahli warisnya. Hibah wasiat itu telah mendekati pengertian wasiat.⁵⁸

Dalam hukum adat di Jawa, banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang untuk modal hidupnya. Kelak, barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan.

⁵⁶Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 113.

⁵⁷Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terjemahan, (Bandung : al-Ma'arif, 1988), Juz XIV, hlm. 215.

⁵⁸Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Tintama, 1992), hlm. 44.

Peninggal orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi. Dalam hukum adat Jawa, proses pewarisan ketika pewaris masih hidup terjadi dengan beberapa cara yaitu penerusan/pengalihan (Jawa: lintiran), penunjukan (acungan), dan berpesan (weling/ wekas). Pengalihan /penunjukan saat pewaris masih lanjut dan anak-anak sudah mantap dalam berumah tangga. Harta untuk bekal kebendaan dalam memperkokoh kehidupan rumah tangga anak. Dalam Adat Jawa, anak lanang gawe omah, wedok ngisi omah.⁵⁹ Pesan/wekas dari orang tua kepada ahli waris ketika masih hidup biasanya diucapkan secara terang-terangan dan dilaksanakan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga, atau tua-tua desa.⁶⁰

Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan tampak ada kecenderungan pilih kasih. Apabila hibah belum sempat dilaksanakan kepada semua anak, tiba-tiba ia meninggal, sebelum diadakan pembagian, harta peninggalan dapat diambil dulu sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta peninggalan, kemudian baru diadakan pembagian warisan. Dalam hal harta warisan jumlahnya amat kecil sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan kepada anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, menurut hemat kami, tidak ada halangannya

⁵⁹Sudiyanto, *Perbandingan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Jawa*, (Yogyakarta; Adicita, tt), hlm. 6.

apabila hibah yang pernah diterima oleh sebagian anak itu diperhitungkan sebagai warisan, atas pertimbangan bahwa adat-istiadat setempat memang memandang pemberian tersebut sebagai warisan yang sudah diberikan pada waktu pewaris masih hidup. Meskipun demikian apabila ternyata bahwa harta barang pemberian itu melebihi bagiannya menurut ketentuan hukum waris, anak bersangkutan tidak perlu mengembalikan kelebihan hartanya kepada ahli waris lain sebab penyerahan barang oleh seseorang pada waktu masih hidup itu adalah hibah yang sah.⁶¹

2. Pelaksanaan Hibah dan Wasiat

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka cara pelaksanaannya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.⁶²

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 7.

⁶¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Warsi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 109.

⁶²*Ibid.*, hlm. 110.

Selain lembaga hibah, di Indonesia dikenal juga dengan lembaga hibah wasiat. Lazimnya hibah wasiat ini dibuat dalam bentuk tertulis/surat hibah wasiat, dan biasanya dibuat atas persetujuan ahli waris, dan sebagai bukti persetujuan, mereka ikut mencantumkan tanda tangan di atas surat hibah wasiat tersebut sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: (1) Pewasiat harus berusia 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya, (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat, dan (3) Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.⁶³ Peryaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan adalah: (1) Wasiat lisan ataupun tulisan dilakukan di hadapan 2 orang saksi/di hadapan notaries, (2) Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris, (3) Wasiat berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris, dan (4) Syarat nomer 2 dan 3 dilakukan secara lisan atau tulisan di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris.⁶⁴

3. Hibah dan Wasiat Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHAPerdata

Hibah dan wasiat adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sepele apabila dilihat dari perbuatan hukum dan peristiwanya sendiri. Meskipun tampaknya sepele tetapi apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar dan untuk

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah : 177).

(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara

mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah : 182).

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kata wasiat disebut lebih dahulu dari kata hibah, tetapi didalam kitab-kitab fiqih dan KUH Perdata hukum hibah lebih dahulu dibahas, baru kemudian wasiat. Tidak prinsip memang antara yang lebih dahulu disebut atau dibahas antara hukum hibah dan hukum wakaf, namun sistematika pembahasan terhadap materi tersebut dalam tni hukum hibah dan hukum wakaf dimulai membahas hibah, perbuatan hukum yang berlakunya setelah kematian pemberi wasiat. Hibah dan wasiat berdasarkan hukum Islam dalam konteks kompetensi absolut Badan-badan Peradilan di Indonesia adalah kewenangan Peradilan Agama (pasal 49 ayat(1), sedang hibah dan wasiat di dalam KHI merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah berkenaan bidang hukum yang terdapat di dalamnya.⁶⁵

Hibah dan wasiat yang dirumuskan dalam pasal demi pasal KHI tidak lepas dari kitab-kitab fiqih dan justru memang bersumber dari al-Quran, hadist dan kitab-kitab fiqih. Mengaitkan materi KHI dengan kajian fiqih dalam tulisan ini, karena hibah dan wasiat yang dimuat dalam KHI bukanlah suatu ketentuan

⁶⁵Lihat *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*,

yang final dan telah mencakup permasalahan hibah dan wasiat. Disebutkan dalam impres, bahwa KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain pengembangannya merujuk pada kajian fiqih, karena dalam kitab fiqih dijelaskan latar belakang dan lahirnya pendapat Ulama Fiqih terhadap obyek yang dikaji dan segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqih merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut hasil kajian yang sudah ada.

Disamping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KHI tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengan membaur permasalahan yang baru, apalagi hibah dan wasiat yang belum diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang hibah dan wasiat belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya. Hampir setiap hukum yang diatur dalam peraturan prundangundangan tidak mampu menampung permasalahan hukum yang berakselerasi dengan perkembangan masyarakat. Wajarlah jika dikatakan hukum berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan zaman, karena hukum tidak mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun lengkapnya suatu kitab hukum, tidak mampu mengantisipasi persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Adalah suatu kodrat, bahwa kehidupan dan perilaku pergaulan manusia secara kontinyu mengalami perubahan. Para ahli ilmu sosial mengajarkan, bahwa sesungguhnya tidak ada masyarakat yang statis, tidak bergerak, melainkan yang ada adalah masyarakat manusia yang secara terus menerus mengalami perubahan. Hanya saja gerak perubahan dari masyarakat yang lain, ada yang cepat, tetapi ada pula yang lambat. Hal ini merupakan ciri dari kehidupan masyarakat. W. Fridmann yang diikuti oleh Teuku Muhammad Radhi, SH. mengatakan, tempo dari perubahan-perubahan sosial pada zaman ini telah berakselerasi pada titik dimana asumsi-asumsi pada hari ini mungkin tidak berlaku dalam beberapa tahun yang akan datang.⁶⁶ Ibnu Khaldun (1332-1440) mengatakan, bahwa keadaan umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, maka keadaan ini terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh sunnatullah berlaku pada hamba-hambaNya.⁶⁷

Adapun tulisan ini menyisipkan pembahasan hibah dan wasiat dalam KUH Perdata dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, sebab wasiat dan hibah yang diatur dalam KUH Perdata tidak lepas dari pengaruh hukum Islam. Meskipun atas pengaruh hukum Islam, tetapi berbeda

⁶⁶Teuku Muhammad Radhi, *Permasalahan Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta : IAIN Syahid, 1981), hlm. 8.

nilai idiilnya dengan hukum islam, karena dalam KUH Perdata hibah dan wasiat digolongkan perjanjian cuma-cuma yang tidak mengandung unsur kasih sayang dan tolong menolong. sedangkan dalam hal islam perbuatan hukumnya dilihat dari asasnya (QS. al-Baqarah ayat 177 dan 180). Hibah dalam KUH Perdata merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya.⁶⁷

Pada asasnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, seseorang menyanggupi memenuhi prestasi disebabkan dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain. Meskipun hibah termasuk hukum perjanjian cuma-cuma, karena hanya ada prestasi dari satu pihak saja (Penghibah), sedangkan penerima hibah tidak ada kewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada penghibah. Dikatakan di waktu hidupnya untuk membedakan hibah dengan testamen atau hibah antara suami istri dalam islam diperbolehkan. Hibah dalam KUH perdata tidak boleh ditarik kembali, sedang dalam islam dapat ditarik kembali, khusus hibah orangtua kandung kepada anak kandungnya. Hibah dan Wasiat dalam KUH Perdata (BW).

Materi hukum tentang hibah dan wasiat dalam KUH Perdata sendiri bukan diambil dari *codex justinianus* carpus juris civilis yang menurut para sejarah sebagai sumber hukum modern dan bukan pula hibah dan wasiat diambil dari kitab undang-undang hasil imajinasi napoleon yang dimuat dalam codex

⁶⁷Subhi Mahmassani, *Falsafah Tasyri' Fil-Islami*, (Bandung : al-Ma'arif, 1981), hlm. 160.

⁶⁸R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Publisher, 1991), hlm. 1.

napoleon yang merupakan asal usul KUH perdata (BW), tetapi codex napoleon justru ide dasarnya ditranformasikan dari kitab fiqih karya Imam al-Syarkawi yang kemudian dalam aplikasinya terdapat perbedaan yang mendasar antara hibah dan wasiat dalam KUH Perdata dengan hibah dan wasiat dalam hukum Islam. Masih melekat dikalangan dunia hukum, bahwa hukum modern selalu dikaitkan dengan negara Eropa, karena memang sejarah hukum senantiasa dikaitkan dengan hukum Romawi, mengingat pengaruh hukum Romawi terhadap perkembangan hukum pada Negara-negara di Eropa sangat besar, khususnya dibidang hukum perdata yang dikembangkan melalui hukum universal atau hukum umum (*jus comune, jus gentium*). *Jus comune* atau *jus gentium* ini merupakan *codex justinianus* yang pada abad ke VI dikodifikasikan sebagai sebuah hukum tertulis oleh Negara-negara Eropa pada abad ke XV dan abad ke XVI. Codex justinianus khususnya hukum perdata menjadi sumber utama dari Hukum Perdata Modern.⁶⁹

Meskipun Codex Justinianus khususnya dibidang hukum perdata yang dikatakan menjadi sumber utama dari hukum perdata modern, namun BW (KUHP Perdata) yang sekarang berlaku di Indonesia yang diberlakukan berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 1945 adalah bersumber dan meniru kitab fiqih hasil karya Ulama Islam. Kitab fiqih mazhab sudah ada sejak tahun 800 M sedangkan BW Eropa baru pada awal abad XIX M, yakni berdasarkan code

⁶⁹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kanisius, 1990), hlm. 34.

napolion yang disusun setelah napolion kembalidari bermukim di Mesir selama kurang lebih 15 bulan antara Bulan Mei 1798 sampai bulan Agustus 1799. Sejarah KUH Perdata (BW) Indonesia sendiri adalah mengikuti kodeifikasi BW di negeri Belanda (1838), sedangkan BW belanda mengikuti BW perancis yang terkenal Code Napolion (1807).

Adapun kodifikasi Hukum Perancis yang merupakan cikal bakal hukum perdata modern Eropa sekarang sesungguhnya berpangkal pada 2 (dua) sumber yaitu Hukum Romawi dan Hukum Islam, hukum Romawi terkenal dengan kodifikasi Yustinianus (483-565) yang disebut Codex Justinianus atau justinianus corpus juris civilis. Sedangkan hukum fiqih Islam diambil oleh Napolion dan dimuat dalam Code napolion berasal dari kitab fiqih karya Abdullah al-Syarkowi (1737-1812 M). Pada waktu Napolion menduduki Kairo Mesir, jabatan al-Syarkawi adalah Syaikh al-Azhar yang diminta Napolion membantu hukum Perancis, yaitu Portalis, Tronchet, Bigot De Preameneu dan Mallevilie yang keempatnya adalah para Sarjana Hukum Prancis yang turut Napolion ke Mesir.

Hasil karya tim hukum Prancis tersebut yang dibantu oleh Imam al-Syarkawi inilah BW Prancis disusun tersebar di nagar-negara Eropa yang dikatakan sumber hukum modern, termasuk yang diadopsi belanda dan diberlakukan pada negara jajahannya termasuk Indonesia yang sampai sekarang BW Belanda tersebut masih berlaku positif di Indonesia yang dikenal dengan KUH Perdata, padahal di Belanda sendiri KUH Perdata tersebut sudah dilakukan perubahan. Oleh karena itu tidak aneh kalau dalam KUH Perdata memuat atau

membicarakan materi hukum hibah dan wasiat dalam pasal-pasal yang tidak lain adalah diambil dari kitab fiqh Imam al-Syarkawi, meskipun telah dilakukan perubahan yang justru telah bertentangan dengan ketentuan hibah dan wasiat dalam hukum Islam. pasal 874 sampai dengan pasal 1022 KUH Perdata tentang wasiat dan hibah adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip kitab fiqh. Pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata adalah tentang hibah mendekati persamaan dengan yang dibahas dalam kitab fiqh, kecuali dalam syarat-syarat tertentu ada perbedaan yang mendasar. Kalau diteruskan lagi mengkaji isi KUH Perdata dengan kitab fiqh, maka tentang penitipan barang dalam pasal 1729 KUH Perdata merupakan terjemahan bebas dalam kitab fikih tentang wadiah (penitipan barang) berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa ayat (58).⁷⁰

Hibah dan Wasiat dalam Islam Ketentuan tentang hukum hibah dan wasiat adalah berdasarkan dalil dalam al-Qur'an dan hadits, sehingga semua Ulama fiqh sepakat (Ijma) tentang ditetapkannya wasiat dan hibah. Ketentuan wasiat dalam al-Qur'an disebutkan antara lain dalam QS. al-Baqarah ayat 180, QS. al-Nisa ayat 12 dan ayat 58, sedangkan dalam Hadis adalah hadis Bukhari Muslim. Ketentuan hibah disebutkan QS. al-Baqarah ayat 177 dan QS. al-Maidah ayat 2, sedangkan hadits adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hibah dan wasiat sendiri pada dasarnya untuk tujuan yang baik,

⁷⁰Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Djamatan, 1985), hlm. 9.

karena pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Faktor yang paling dalam disyariatkan hibah dan wasiat ini adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah yang berwasiat. Kalapun akan dibedakannya hanya waktu pelaksanaannya, yaitu hibah dilaksanakan semasa penghibah masih hidup, sedang wasiat dilaksanakan setelah pewasiat wafat.

BAB III

TINJAUAN TENTANG HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA

A. Peradilan Agama ; Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya, Tujuan dan Fungsinya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99, maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumatra.¹ Dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Bangking, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang,² dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan kata Mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendekiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkan lah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

¹Sumber Data, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99 dan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumatra, Tanggal 13 November 1957.

²Sumber Data, *Dokumentasi*, Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru, Jl. Rawa Indah Pekanbaru, 2012.

Dengan dilantiknya KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara Yuridis Pengadilan Agama telah berdiri, dan atas dasar Hari Pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun. Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.³

Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri. Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan pelanduk kecamatan sukajadi hingga april 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman

³Sumber Data, *Dokumentasi*, Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru, Jl. Rawa Indah Pekanbaru, 2012.

HAR, SH (1994-1998). Drs.H. Lumban Hutabarat, SH, MH (2004-2006) dan Drs. H. Masruh (2007).⁴

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum MhH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad Nomor 1 Pekanbaru.⁵ Perjalanan panjang perjuangan menuju Eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama ke dalam Protocol Muspida dan memberi Fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.⁶ Sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama

⁴Sumber Data, *Dokumentasi*, Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru, Jl. Rawa Indah Pekanbaru, 2012.

⁵Sumber Data, *Dokumentasi*, Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru, Jl. Rawa Indah Pekanbaru, 2012.

⁶Sumber Data, *Dokumentasi*, Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru, Jl. Rawa Indah Pekanbaru, 2012.

Pekanbaru, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, yang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara Faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga

Peradilan di Indonesia., dijelaskan sebagai berikut :

Merujuk pada ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Pengadilan di Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum dan keadilan merupakan fungsi utama pengadilan. Di samping itu masih ada fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan serta fungsi mediator dan pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian sesungguhnya pengadilan di Indonesia dalam menghadapi setiap perkara yang diajukan kepadanya itu memiliki 3 (tiga) fungsi sekaligus yaitu : (1) Sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya, (2) Sebagai pelayanan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, (3) Sebagai mediator dan pemulih kedamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁷

Dari ketiga fungsi ini merupakan fungsi pengadilan yang seutuhnya (holistik) yang harus dilakukan secara simultan dan proporsional. Fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan merupakan fungsi yang pokok pengadilan sebagai lembaga yudikatif. Menurut Hans Kelsen, fungsi yudikatif adalah melakukan konstatirring dan konstituiring terhadap kasus diadilinya. Pada umumnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebaikan (kemaslahatan) baik secara mikro maupun makro. Secara mikro hukum bertujuan untuk menjadikan setiap individu menjadi orang yang mau berbuat baik dan tidak berbuat jahat, tujuan ini akan

⁷Sumber Data, *Dokumentasi*, Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru, Jl. Rawa Indah Pekanbaru, 2012.

tercapai ketika individu mau mentaati aturan hukum yang berlaku baginya. Sedangkan secara makro hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang dapat terjaminnya eksistensi, keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam ilmu hukum Islam keselamatan manusia terletak pada kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan manusia.⁸

B. Sumber dan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

Peraturan Peraturan Perundangan tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang ini, baik dalam HIR maupun RBg merupakan warisan Pemerintahan Hindia Belanda yang sudah berumur puluhan atau bahkan ratusan Tahun. Mengingat usianya yang sudah mencapai sekitar 1 abad. Peraturan Hukum Acara Perdata sesungguhnya memerlukan berbagai penyesuaian dan pembaharuan hukum agar memiliki relevansi perkembangan zaman yang terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan Agama dan juga mengatur

⁸Perlindungan ini oleh para pakar Hukum Islam dirumuskan dalam lima tujuan (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz III, hlm. 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz III, hlm. 274.

bagaimana cara Peradilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai Peradilan Khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan tugas pokok (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka peradilan Agama dahulunya, mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formil Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia).⁹

Namun kini, setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor tahun 2003, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkrit. Pasal 54 dari undang-undang tersebut berbunyi:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”¹⁰

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan yaitu :

⁹Lihat *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989* yang telah diamandemen menjadi *Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama*, Pasal 54.

¹⁰Lihat *Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, *Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung* diamandemen dengan *Undang-undang Nomor 5 tahun 2005*, dan *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Perkawinan*.

(1) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum Acara Perdata Peradilan Umum, yaitu: (1) HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui), (2) Rbg (Rechts Reglemet Buitengewesten) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa–Madura, (3) Rsv (reglemnt op de Burgelijke Rechtsvordering) yang zaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie, (4) Bw (Buigelijke wetboek) atau disebut juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata eropah, dan (5) Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum. Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peadilan agama, antara lain : (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung da tela diamandemen dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2005, dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.¹¹

Jika demikian maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2003, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang tadi telah disebutkan .selain dari itu, pada suatu ketika Peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum proses menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama.

C. Kekuasaan dan Kewenangan Dalam Hukum Acara Perdata

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tenang “Kekuasan Relatif”

¹¹Lihat *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama*,

dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai :

Kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tentang dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.¹²

Menurut teori Hukum Acara Perdata Peradilan Umum (tentang tempat mengajukan gugatan) apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja, diperbolehkan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi dari pihak lawan. Juga boleh saja orang memilih untuk berperkara di muka pengadilan Negeri mana saja sepanjang mereka sepakati. Pengadilan Negeri dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut di samping boleh juga menolaknya. Namun dalam praktek Pengadilan Negeri sejak dari semula sudah tidak berkenan menerima gugatan/permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke pengadilan negeri mana seharusnya gugatan/permohonan itu diajukan. Ketentuan umum Peradilan Umum tersebut berlaku

¹²Lihat *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989* yang telah diamandemen menjadi *Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama*,

juga untuk Pengadilan Agama sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut diartikan sebagai :

Kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lain misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang non Muslim menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.¹³

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya, jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi Absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat Banding atau Tingkat Kasasi . Pada tingkat Kasasi eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antar tiga alasan yang memperbolehkan orang memohon Kasasi dan dapat

¹³Lihat *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989* yang telah diamandemen menjadi *Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama*,

dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.

3. Surat Kuasa

Menurut peraturan perundang-undangan yang ada, beracara di muka pengadilan dapat dilakukan secara langsung, tetapi dapat juga secara tidak langsung dengan mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain yaitu penerima kuasa. Pemberian kuasa diatur dalam pasal 123 HIR /147 Rbg yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan perkaranya itu kepada orang lain dengan surat kuasa khusus. Bagi penggugat dapat mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatan. Apabila gugatan diajukan secara lisan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan dan ketua Pengadilan Negeri akan mencatat atau menyuruh mencatatkan. Sebagai catatan surat kuasa khusus tidak diperlukan bagi seorang jaksa atau pegawai negeri yang mewakili negara. Demikian pula surat kuasa khusus tidak diperlukan pula untuk pengurus/direksi suatu perusahaan. Dalam pasal 1729 BW dinyatakan :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan” dengan demikian penerimaan kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa. Dalam pasal 1795 BW ditegaskan pula bahwa “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, artinya menunjukan kepada macam perkara tertentu dengan perincian seperti yang tercantum dalam kuasa yang diberikan, misal soal warisan, jual beli dan sebagainya. Apabila hakim ragu-ragu, ia dapat memerintahkan si pemberi kuasa hadir sendiri ke muka pengadilan untuk menjelaskan apa isi yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan melampaui kuasa yang diberikan dan supaya pemberi kuasa tidak dirugikan, apabila terjadi penerima kuasa melampaui kuasa yang diberikan, maka peristiwa itu dianggap tidak pernah

ada/terjadi dan pemberi kuasa dapat menuntut penerima kuasa supaya menghentikan tindakan yang melebihi kuasa itu disebut *action en desavue*.¹⁴

Syarat sahnya Kuasa Khusus; Ada beberapa syarat sah surat kuasa khusus, yaitu :

(1) Harus berbentuk tertulis, yaitu: (a) Dibuat panitera Pengadilan Negeri yang dilegalisir oleh KPN atau hakim, (b) Akta di bawah tangan, (c) Ber bentuk akta autentik yang dibuat notaris; (2) Menyebut identitas para pihak (pemberi dan penerima kuasa yaitu nama, pekerjaan, alamat dan lain – lain), (3) Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan atau hal pokok yang menjadi sengketa, (4) Isi kuasa yang diberikan, menjelaskan kekhususan isi kuasa dalam batas – batas tertentu artinya apabila tidak disebut dalam kuasa itu, penerima kuasa tidak berwenang melakukannya, (4) Penegasan kompetensi relatif, yaitu wilayah Pengadilan Negeri mana akan diperiksa, (5) Memuat hak substitusi (pelimpahan). Apabila penerima kuasa berhalangan dapat melimpahkan kepada orang lain perkara tidak macet.¹⁵

Pada dasarnya syarat–syarat di atas bersifat komulatif, bukan alternatif artinya harus semua persyaratan dipenuhi. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa menjadi cacat hukum dengan sendirinya kedudukan penerima kuasa tidak sah, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa tidak sah dan tidak mengikat. Adapun formulasi surat kuasa khusus dipertegas dalam SEMA tanggal 23 Januari 1971.

¹⁴Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 1729 BW dan Pasal 1795 BW.

¹⁵Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 1796 BW.

D. Beberapa Istilah Dalam Hukum Acara Perdata

Ada beberapa istilah terkait dengan Acara Perdata di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, yaitu :

1. Penggugat dan Tergugat

Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya kemuka pengadilan Perdata. Pengugat disebut sebagai *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab). Penggugat mungkin sendiri mungkin gabungan dari beberapa orang, sehingga munculah istilah Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya, juga mungkin memakai kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa penggugat I, Kuasa Penggugat II dan seterusnya. Sebagai kuasa atau wakil dari penggugat, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Harus mempunyai surat kuasa Khusus (Pasal 123 ayat 1 HIR/ pasal 147 Rbg), (2) Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan (pasal 123 ayat 1 HIR/ pasal 147 Rbg), (3) Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan, (4)Ditunjukan oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan, (5)Memenuhi syarat dalam peraturan menteri kehakiman no 1/1965 tanggal 28 mei 1965 jo keputusan menteri kehakiman nomor ZP 14/2/II tanggal 7 oktober 1965 tentang POKPOL, (6) Telah terdaftar sebagai advokat.¹⁶

Sementara Tergugat adalah lawan dari penggugat atau *gedagde* (Belanda) atau *al mudda'a* (Arab). Keadaan Tergugat juga mungkin sendiri atau mungkin gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa. Gabungan penggugat atau Tergugat ini disebut “kumulasi subjektif “ artinya subjek hukum yang bergabung

¹⁶*Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 123 ayat 1 HIR/ pasal 147 Rbg., dan Pasal 123 ayat 1 HIR/ Pasal 147 Rbg.

dalam berperkara. Sebagai wakil atau kuasa hukum khusus dari tergugat, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus mempunyai surat kuasa khusus, b) Ditunjuk oleh tergugat sebagai kuasa atau wakil dalam persidangan, c) Memenuhi syarat Peraturan menteri Kehakiman jo. Keputusan menteri kehakiman no Z P 14/2/II tanggal 7 oktober 1965 tentang POKPOL, dan d) Telah terdaftar sebagai Advokat.¹⁷

2. Pemohon, Termohon dan Gugatan

Dalam proses Hukum Acara perdata di pengadilan umum di samping pengadilan dalam arti sesungguhnya, ada kemungkinan seseorang memohon kepada pengadilan untuk meminta ditetapkan atau mohon ditegaskan suatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Sedangkan proses Hukum Acara Perdata di Pengadilan agama terutama dalam perkara-perkara perkawinan, walaupun disebut “pemohon” atau “Termohon” atau “permohonan tidaklah mutlak selalu berarti perkara voluntaria sepenuhnya seperti teori umum Hukum Acara Perdata., dijelaskan sebagai berikut :

Memahaminya sebagai contentiosa ataukah voluntaria harus melihat konteksnya Orang yang memohon disebut dengan istilah “Pemohon” atau *introductief request* (Belanda), atau *almudda’y* (Arab). Misalnya dalam pasal 65–72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang permohaan cerai talak. Di sini, suami sebagai Pemohon, istri sebagai termohon, produk Pengadilan Agama adalah penetapan tetapi istri maupun suami

¹⁷Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 123 ayat 1 HIR/ pasal 147 Rbg., dan Pasal 123 ayat 1 HIR/ Pasal 147 Rbg.

berhak Banding dan seterusnya Kasasi, sehingga status Suami (pemohon) di situ sama seperti Penggugat dan istri sama seperti Tergugat.¹⁸

Dalam Hukum Acara di Peradilan Umum, Termohon sebenarnya dalam arti “asli” bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena Termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon, jadi dalam arti asli, termohon tidak imperatif hadir di depan sidang seperti halnya tergugat, artinya sekalipun termohon tidak hadir, bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka Permohonan akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak, dijelaskan sebagai berikut :

Dalam Peradilan Agama sama halnya dengan istilah Termohon, Termohon juga di lingkungan Peradilan Agama pertama kali muncul bersamaan dengan munculnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, di mana di dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan “permohonan” oleh “pemohon.”¹⁹

Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar

¹⁸Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi *Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama*, Pasal 65–72.

¹⁹Permohonan di dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak bisa dianggap sebagai *voluntaria* sepenuhnya (seperti aslinya) sehingga kalau suami sebagai pemohon maka istri sebagai termohon. Misalnya Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang permohonan pembatalan perkawinan. Walaupun disini disebutkan istilah “permohonan” tetapi pemohon harus disebut penggugat dan termohon harus disebut tergugat sedangkan produk Pengadilan Agama harus putusan.

haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar, sebagai berikut :

Hukum Perdata sebagaimana dimaklumi adalah mengatur hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain, sedangkan Hukum Acara Perdata adalah mengatur tentang cara mewujudkan/mempertahankan Hukum Perdata itu. Apakah seseorang mau menggugat atau tidak, sekalipun ada haknya yang diperkosa oleh orang lain, sepenuhnya terserah kepada orang itu sendiri. Yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan sipapun, sebab yang demikian itu adalah hak prive (pribadi)nya sendiri. Itu berarti, sekalipun seseorang diperkosa haknya oleh orang lain, kalau ia diam saja tidak mau menggugat, tidak bisa dipaksakan supaya ia menggugat. Sebaliknya sekalipun tidak ada hak perdatanya yang diperkosa oleh seseorang tetapi ia secara mau coba-coba menggugat nekad, juga tidak bisa dilarang. Menurut ketentuan pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau surat gugatan. Oleh karena gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud. Menurut Yurisprudensi surat gugat yang bercap jempol harus dilegalisasi terlebih dahulu. Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisasi. Berdasarkan Yurisprudensi bukanlah batal, tetap akan dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian. Surat gugat harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Yang dimaksud dengan wakil adalah seorang kuasa yang sengaja di beri kuasa berdasarkan suatu surat kuasa khusus. Untuk membuat dan menandatangani surat gugat. Oleh karena surat gugatan ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, maka tanggal pemberian surat kuasa harus lebih dahulu dari tanggal surat gugat. Suatu perkara yang terdiri dari dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang berlawanan disebut *Jurisdictio contentiosa* atau “ Peradilan yang sesungguhnya “ karena peradilan yang

sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan atau *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab).²⁰

3. Permohonan dan Jawaban

Dalam perkara yang disebut permohonan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum tidak terdapat sengketa, disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga Tata Usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan sebuah penetapan atau lazimnya disebut putusan declaratoir yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam persolan ini hakim tidak memutus sesuatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Ciri-ciri Permohonan:

(1) Acara permohonan bersifat Voluntoir, (2) Terdapat satu pihak yang berkepentingan, (3) Tidak mengandung sengketa, (4) oleh Peraturan Perundang-undangan, (5) Putusan Hakim berupa penetapan, dan (6) Upaya Hukumnya adalah Kasasi.²¹

Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* atau “pengadilan tidak sesungguhnya. Dikatakan Peradilan tidak sesungguhnya karena pengadilan di ketika itu sebenarnya hanya menjalankan fungsi executive power bukan judicative power. Karena peradilan tidak sesungguhnya maka produk pengadilan adalah penetapan atau *beschikking* (Belanda) atau *al isbat* (Arab). Namun Dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama khusus untuk perkara-perkara Perkawinan ada perkara yang sepertinya

²⁰Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 120 HIR.

²¹Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 121 HIR.

voluntaria, tetapi kenyataannya adalah contentiosa, sehingga dalam keadaan seperti ini, walaupun namanya permohonan namun bentuknya seperti gugatan, begitu pula dengan hasil produknya bias berupa penetapan ataupun putusan tergantung konteks perkara tersebut,²² dijelaskan sebagai berikut :

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (pasal 145 ayat 2 Rbg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, tetapi dapat juga berupa bantahan (*verwee*). Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, sehingga kalau tergugat membantah penggugat harus membuktikan. Walaupun pengakuan diberikan oleh salah satu pihak yang berperkara, namun merupakan alat bukti. Pengakuan harus dibedakan dari *referte* (*referte aan het oordeel rechters*), kedua-duanya merupakan jawaban yang tidak bersifat membantah. Kalau pengakuan itu merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan, maka *referte* berarti menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan perkara itu tidak secara langsung menyangkut kepentingannya, melainkan kepentingan orang lain. Jadi setengahnya bersikap masa bodoh.²³

Apabila tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim, ia di dalam tingkat banding masih berhak mengajukan bantahan. Meskipun HIR tidak menyebutkan, akan tetapi sudah selayaknya kalau jawaban tergugat itu disertai dengan alasan-alasan karena dengan tergugat hanya sekedar menyangkal gugatan saja, tetapi harus diberi alasan apa sebabnya ia menyangkal. Sangkalan yang tidak cukup beralasan dapat dikesampingkan oleh hakim, demikian putusan

²²Misalnya dalam perkara perceraian yang mempunyai hak untuk Mengajukan Permohonan adalah Suami yaitu dengan mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri baik secara lisan maupun tulisan. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Karya Anda, 200), Pasal 129.

²³Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg.

Raad Justisi Jakarta 1 April 1938. Pasal 113 Rv mensyaratkan agar bantahan tergugat itu disertai alasan–alasan. Menurut pasal 136 HIR (pasal 162 Rbg) maka jawaban yang berupa tangkisan (eksepsi), kecuali tangkisan tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama–sama dengan pokok perkara. Bantahan (verweer) pada hakekatnya bertujuan agar gugatan penggugat ditolak dan bantahan tergugat ini dapat terdiri dari tangkisan atau eksepsi dan sangkalan.²⁴

4. Replik dan Duplik

Setelah mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri selanjutnya adalah replik yaitu tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan–alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Setelah penggugat mengajukan replik, tahap pemeriksaan selanjutnya adalah duplik, yaitu tanggapan tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat, sama halnya dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya lazim berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.²⁵

²⁴Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 113 Rv, dan Pasal 136 HIR (pasal 162 Rbg).

²⁵Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 113 Rv, dan Pasal 136 HIR (pasal 162 Rbg).

E. Pembuktian, Putusan, Banding dan Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian, Azas dan Sistem Pembuktian

Yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah :

Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka Pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan. Untuk membuktikan, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan atau menyetangkannya ke muka sidang, tidak usah menunggu diminta oleh siapa pun.²⁶

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dijumpai dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja yaitu: “Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu adanya peristiwa tersebut.”²⁷

Sistem (dari bahasa Inggris, system) artinya suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan (kesatuan) untuk melaksanakan sesuatu fungsi, jadi pengertiannya sama sekali lain dengan sistem (dari bahasa Belanda sisteem) yang artinya cara. Sistem Hukum Acara Perdata menurut HIR/RBg adalah berdasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terkait mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah

²⁶Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg.

²⁷Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg.

diatur dalam HIR/RBg, karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu. Sistem ini sudah lama ditingalkan karena keperluan hukum dan praktek penyelenggaraan peradilan, sehingga dipakailah Hukum Acara Perdata yang bukan hanya terdapat di dalam HIR/RBg tetapi juga yang didapat dari BW, dari Rv, dari kebiasaan-kebiasaan praktek penyelenggaraan Peradilan, termasuk dari surat-surat Edaran dan petunjuk dari Mahkamah Agung.

Selain daripada itu aliran kebenaran formil juga sudah beralih kepada kebenaran material, artinya walaupun alat bukti secara sah formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara material, aliran yang disebut terakhir ini dahulunya dianut dalam hukum Acara Pidana saja. Bukti-bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 164 HIR adalah: (1) Bukti Tertulis (Bukti Surat), (2) Bukti Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, dan (5) Sumpah.

2. Alat Bukti Tertulis (Bukti Surat) dan Pembuktian Dengan Saksi

Secara umum diatur dalam Pasal 138,164,165,167 HIR, Pasal 285-305 Rbg, Pasal 1867-1894 BW, dan juga Pasal 138-147 Rsv. Stbl 1867-29 Pasal 137 HIR berbunyi :

Kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan lawannya yang untuk maksud itu diserahkan kepada Hakim”. pasal tersebut diatas memungkinkan agar diserahkan kepada kedua belah pihak untuk minta dari pihak lawan agar diserahkan kepada hakim surat - surat yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa agar ia dapat meyakinkan isi surat-surat tersebut, serta memeriksa apakah ada alasan untuk menyangkal keabsahan surat-surat tersebut. Dalam Hukum Acara

perdata mengenal 3 macam surat ialah: a) Surat Biasa, b) Akta Otentik, c) Akta di Bawah Tangan. Perbedaan dari ketiga macam surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya. Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam Hukum Acara Perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam Hukum Adat, di mana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan. Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan - alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal - hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.²⁸

Seorang saksi dilarang menarik kesimpulan karena hal itu adalah Tugas Hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut acara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah sumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut pasal 242 KUHP. Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dan pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim (Pasal

²⁸Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP)*, Pasal 138,164,165,167 HIR, Pasal 285-305 Rbg, Pasal 1867-1894 BW, dan juga Pasal 138-147 Rsv. Stbl 1867-29 Pasal 137 HIR, Pasal 171 ayat 2 HIR.

76 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Variasi Alat Bukti Saksi yaitu :

1) Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya 4 orang lelaki yang beragama Islam, 2) Jika menuduh istri sendiri telah berzina (tidak berlaku bagi tuduhan terhadap perempuan selain istri) tetapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang beragama Islam dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan sumpah Lia'an., 3) Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam perjalanan (musafir) oleh 2 orang lelaki yang beragama Islam, atau boleh 2 orang perempuan beragama Islam semua, atau oleh 2 orang lelaki yang bukan beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang semuanya bukan beragama Islam, 4) Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk hudud badan atau qisas jawa, dengan 2 orang saksi lelaki yang beragama Islam, 5) Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwalian, perdamaian, pengakuan, pembebasan, dan lain-lain jenis itu, yang pada umumnya bersifat hak keperdataan.²⁹

3. Putusan

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai

²⁹Lihat *Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 76 ayat 1 dan 2.

kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, disamping putusan hakim masih ada Penetapan Hakim. Jadi Putusan adalah Perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 Rbg) membedakan putusan menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat :

- a. Menghukum (condemnatoir); Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir diakui hak Penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman itu hanya terjadi berhubungan dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang – undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- b. Menciptakan (constitutif); Constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya putusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutuan perjanjian(pasal 1266, 1267 BW). Putusan constitutif ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa. Pengampuan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.
- c. Menerangkan (declaratoir); Declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan declaratoir. Putusan declaratoir murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan daripada pihak lawan yang

dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.³⁰

Di samping Putusan akhir masih dikenal putusan yang bukan akhir atau disebut juga putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR (pasal 196 ayat 1 Rbg) sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Selanjutnya pasal 190 ayat 1 HIR (pasal 201 ayat 1 (Rbg) menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir. Di samping pasal 185 ayat 1 HIR yang membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir, pasal 48 Rv membedakan antara :

(1) Putusan Praeparatoir ; Preparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir. Tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, dan (2) Putusan Interlocutoir ; Interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian misalnya: pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat, kalau putusan praeparatoir tidak mempengaruhi putusan akhir, maka putusan Interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir. Sementara Rv masih mengenal 2 putusan lainnya yang bukan putusan akhir yaitu : (1) Putusan Insidentil; Putusan Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalnya putusan yang membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara (pasal 70,279 Rv), (2) Putusan provisionil ; Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah

³⁰Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)*, Pasal 185 ayat 1 HIR, Pasal 196 ayat 1 Rbg.

satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan untuk melaksanakan putusan sela yang mengabulkan putusan provisionil ini Mahkamah Agung menginstruksikan agar adanya persetujuan khusus dari Mahkamah Agung, kemudian instruksi tersebut itu dilimpahkan kepada ketua pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.³¹

Pada Azasnya suatu putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, pengecualiannya ada yaitu, apabila suatu putusan dijatuhkan dengan kekuatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Cara melakukan putusan Hakim diatur dalam pasal 195-208 HIR sehubungan dengan hal ini dikemukakan bahwa pasal 209-222 HIR sesungguhnya juga mengatur perihal cara melaksanakan putusan, khususnya perihal sandera. Akan tetapi pasal-pasal tersebut berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 jo. Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 dibekukan artinya tidak dipergunakan dalam praktek. Mahkamah Agung berpendapat bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar Falsafah Negara Indonesia, ialah bertentangan dengan sila Perikemanusiaan.

³¹Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP)*, Pasal 185 ayat 1 HIR dan Pasal 48 Rv.

Putusan dilaksanakan dibawah pimpinan ketua Pengadilan yang mula - mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam delapan hari memenuhi putusan tersebut dengan suka rela. Jika pihak yang dikalahkan itu tidak mau melaksanakan putusan itu dengan suka rela, maka baru pelaksanaan yang sesungguhnya dimulai.

4. Banding

Salah satu upaya hukum biasa adalah banding, lembaga banding diadakan oleh pembuat undang-undang oleh karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa, membuat kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan, oleh karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi. Dengan diajukannya permohonan banding, perkara jadi mentah lagi, Putusan Pengadilan Negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atau putusan tersebut adalah suatu putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Adapun perosedurnya adalah :

Berkas perkara yang bersangkutan beserta salinan resmi putusan tersebut, serta surat-surat yang lainnya akan dikirimkan kepada Pengadilan tinggi untuk dipeiksa dan diputus lagi. Yang akan diperiksa adalah semua surat-suratnya dengan lain perkataan berkasnya. Jarang sekali terjadi bahwa yang bersangkutan yaitu penggugat dan tergugat diperiksa lagi oleh Pengadilan Tinggi. Hal itu hanyalah dilakukan apabila Pengadilan Tinggi menganggap bahwa pemeriksaan belum sempurna dilakukan dan menjatuhkan putusan sela dengan maksud untuk memperlengkapi pemeriksaan tersebut sendiri. Pada umunya seandainya dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menghemat waktu dan biaya. Adalah amat sukar bagi pihak-pihak yang bersangkutan

apabila harus menghadap pada persidangan Pengadilan tinggi yang terletak di Ibukota Provinsi, pengadilan Tinggi pada taraf banding akan meneliti apakah pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang dengan cukup teliti selain itu akan diperiksa apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pertama sudah tepat dan benar, putusan Pengadilan Negeri akan dikuatkan. Apabila putusan tersebut dianggap salah putusan akan dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberi peradilan sendiri, dengan lain perkataan akan memberi putusan yang lain yang berbeda dengan putusan pengadilan negeri. Ada kalanya putusan tersebut dianggap kurang tepat sehingga putusan tersebut harus diperbaiki. Apabila pemeriksaan perkara dianggap kurang lengkap, sehingga perlu dilengkapi, dalam hal itu berkas perkara akan dikirim kembali kepada pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk dilengkapi atau pengadilan Tinggi akan melakukan pemeriksaan tambahan sendiri. Untuk memerintahkan hal itu akan dijatuhkan suatu putusan sela yang dengan jelas memuat hal-hal yang dianggap kurang dan perlu ditambah pemeriksaanya.³²

5. Kasasi

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi. Dasar hukum bagi Pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam :

Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi: “Terhadap Putusan-Putusan yang diberikan tingkat akhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, Kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985, mengatur hukum Acara bagi Mahkamah Agung sehubungan dengan tugasnya untuk memberikan putusannya dalam Tingkat Kasasi. Permohonan Kasasi dapat diajukan secara tertulis dan lisan melalui panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon Pasal 46 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985). Apabila lewat tanpa ada permohonan Kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara,

³²Lihat *Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 9 ayat 1 dan 2.

maka pihak yang diperkarakan, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.³³

6. Peninjauan Kembali

Dalam Hukum Acara yang diatur dalam Rv untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan dibuka kemungkinan untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan dan putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Peraturan Perundang-undangan istilah Peninjauan Kembali disebut dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Terhadap keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan Kembali, hanya apabila terhadap hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang.” Istilah ini juga digunakan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang – Undang.”³⁴

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mengatur lembaga peninjauan Kembali secara terarah dan lengkap. Dengan demikian, maka dewasa ini ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk peninjauan kembali khusus perkara perdata adalah pasal 66-76 Undang-undang Mahkamah

³³Lihat *Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 10 ayat 1 dan 2.

³⁴Lihat *Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*, Pasal 31.

Agung no 14 tahun 1985, sedangkan untuk perkara Pidana tetap berlaku peraturan yang terdapat dalam KUHAP. Dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 dinyatakan:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a). Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau berdasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan Palsu, b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat - surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan, c) Apabila ia telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.³⁵

7. Eksekusi

Ada 3 macam eksekusi yang dikenal oleh Hukum Acara Perdata yaitu:

Pertama, Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Apabila seseorang enggan untuk dengan suka rela memenuhi isi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu telah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan Hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan tersebut. Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila diperkirakan masih tidak mencukupi, juga dilakukan kepada barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran

³⁵Lihat *Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Pasal 66-76.

sejumlah uang yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan tersebut dia atas disebut Sita eksekutorial.³⁶

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal ada 2 macam Sita esekutorial yaitu:

(1) Sita Eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan, dan (2) Sita Eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi kaena sebelumnya tidak ada sita jaminan Ketentuan Pasal 201-205 HIR mengatur tentang cara bagaimana pelaksanaan harus dilakukan apabila dalam waktu yang bersamaan diajukan untuk melaksanakan dua putusan atau lebih terhadap orang yang sama. Harus diingat bahwa permohonan tersebut harus berdasarkan, dalam arti putusan-putusan yang dimaksud memang harus dilaksanakan, ini berarti bukan suatu keharusan atas perkara yang masih sedang diperiksa, lalu ditunggu hingga sampai selesai, untuk kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Apabila ternyata bahwa hasil pelelangan seluruh baranng-barang yang disita, tidak cukup untuk membayar semua hutang-hutang yang harus dibayar, maka pendapatan lelang itu akan dibagi seimbang dengan hutang yang ditagih oleh masing-masing, untuk sisanya yang belum dibayar tetap merupakan utang apabila tergugat mempunyai barang-barang lagi dikemudian hari maka barang-barang tersebut dapat dimohonkan agar disita untuk dilelang lagi. Sehubungan dengan sisa utang yang belum dibayar tersebut diatas akan dikutip ketentuan yang mengatur perihal kadaluarsa utang piutang dalam Stbl 1832 no. 41 yang terdapat dalam Kitab Engelbrecht di bagian belakang BW pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Segala tagihan yang ditimbulkan karena putusan hakim atau karena surat utang yang dibuat di hadapan Notaris bekardaluarsa setelah lampau atau diakui atu sejak dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri untuk membayar.”³⁷

Kedua, Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Ketentuan tersebut berbunyi :

1) Jika seseorang dihukum akan melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh Hakim, bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan Hakim itu meminta kepada Pengadilan

³⁶Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP)*, Pasal 196 HIR.

³⁷Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP)*, Pasal 201-205 HIR.

Negeri dengan pertolongan ketuanya baik akan didapatkannya, jika putusan itu diturut, dinilai dengan uang yang banyak harus diberitahukan dengan tertentu, jika permintan itu dilakukan dengan lisan maka hal itu harus dicatat, 2) Ketua mengemukakan perkara itu dalam persidangan Pengadilan Negeri, sesudah diperiksa atau dipanggil orang yang berutang itu dengan patut, maka sebagaimana dengan menurut pendapat Pengadilan Negeri, permintaan itu ditolak atau dinilai harga perbuatan yang diperintahkan, akan tetapi yang tiada dilakukan itu sebesar jumlah yang dikehendaki oleh sipeminta atau sebesar jumlah yang kurang daripada itu. Dalam hal jumlah itu ditetapkan maka orang yang berutang itu dihukum akan membayar jumlah itu. Menurut Pasal 225 HIR yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang. Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti daripada pekerjaan yang ia harus lakukan berdasar Putusan Hakim. Yang menilai besarnya enggantian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Perlu dicatat bahwa bukan putusan pengadilan negeri saja, akan tetapi putusan pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agungapun dapat diperlakukan demikian, tegasnya putusan yang sedang dilaksanakan itu. Yang lebih menarik perhatian adalah bahwa perubahan putusan ini dilakukan atas kebijaksanaan Ketua pengadilan Negeri yang sedang memimpin eksekusi tersebut. Dengan demikian, tidak dalam sidang terbuka.³⁸

Ketiga, Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR, dijelaskan sebagai berikut :

Perihal eksekusi Riil ini tidak diatur dalam HIR, meskipun eksekusi riil ini tidak diatur secara seksama dalam HIR, namun eksekusi riil ini sudah lazim dilakukan karena dalam praktek sangat dipelukan. Ketentuan pasal 1033 RV yang mengaur perihal eksekusi Riil berbunyi: "Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seseorang jurusita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan negara barang itu dikosongka oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaanya."

³⁸Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP)*, Pasal 225 HIR.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr Tentang Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat

1. Penggugat, Tergugat dan Gugatan

Para Penggugat dalam perkara sengketa pembagian mal waris (Kewarisan) di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr Tanggal 26 Juli 2007, terdiri dari 7 (tujuh) orang sebagai berikut :

Bismillahirrahmanirrahim, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Mal Waris sebagai berikut dalam perkara antara :

- a. Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH bin Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor 21, Tangkerang Selatan, Pekanbaru, disebut sebagai Penggugat I,
- b. Dr. (HC) Syamsiah Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Permatasari Nomor 2, Kelurahan Tangkerang, Pekanbaru, disebut sebagai Penggugat II,
- c. Drs. H. Fachruddin Bakar bin Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 54, Pekanbaru, disebut sebagai Penggugat III,
- d. Nurbaya Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Gang al-Ihwan Nomor 12 A, Pekanbaru, disebut sebagai Penggugat IV,
- e. Olia Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Jelatik Raya Nomor 2, Pekanbaru, disebut sebagai Penggugat V,
- f. Olina Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Melur Nomor 40 A, Pekanbaru, disebut sebagai Penggugat VI,
- g. Syamsini Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Irmala Nomor 14, Pekanbaru, disebut sebagai Penggugat VII,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : (1) H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., (2) Kurniati, S.H. dan (3) Hasan Basri, S.Ag., S.H., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syamsul Rakan Chaniago, SH & Associates, berkantor di

Simpang Tiga Bussines Centre Blok A 10, Jalan Jend. Sudirman, Pekanbaru, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2005, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Nomor : 76/2006 04-07-2006, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.¹

Sementara para Tergugat dan turut Tergugat terdiri dari 11 (sebelas) orang sebagai berikut :

Lawan :

- 1) Aminah binti Rajiman, bertempat tinggal di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A I Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Tergugat I,
- 2) Awiwati, bertempat tinggal di Perumahan Anggrek Mas I Blok B Jalan Wortel Nomor 16 Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Tergugat II,
- 3) Hj. Anawati Bakar, BA, bertempat tinggal di Damai Langgeng Jalan Jati Blok C Nomor 02, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat I,
- 4) Asniwati Bakar, B.Sc, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat II,
- 5) Aswin Bakar, SH, MBA, bertempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 89 A Labuh Baru, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat III,
- 6) Dra. Minarti Bakar, bertempat tinggal di Jalan Margahayu Raya Jalan Soekarno Hatta Blok A Nomor 305, Bandung, Jawa Barat, disebut sebagai Turut Tergugat IV,
- 7) Dra. Kartika Sari Bakar, bertempat tinggal di Jalan Rintis Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, disebut sebagai Turut Tergugat V,
- 8) Drs. Agus Yanto Bakar, MM, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A I Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VI,
- 9) Agustini Bakar, SE, Ak, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VII,
- 10) Guntur Syahputra Bakar, bertempat tinggal Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Kota Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VIII,
- 11) Yanuar, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Anggrek Mas I Blok C Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat IX,
- 12) Aguslan, bertempat tinggal di Jalan Dorak Nomor 2 Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, disebut sebagai Turut Tergugat X,

¹Pengadilan Agama (PA) Kota Pekanbaru, *Dokumentasi Putusan Nomor: 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, Tanggal 26 Juli 2007 Tentang Kewarisan*, (Pekanbaru : PA. Pekanbaru, 2006), hlm. 1-2.

- 13) Afrida, SE, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Anggrek Mas I Blok B Nomor 16 Jalan Wortel Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat XI,

Dalam hal ini Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, telah memberi kuasa kepada : (1) Aziun Asyaari, S.H., M.H., (2) Edi Azmi, S.H., (3) M. Amin, S.H., dan Zulkhairi, S.H., keempatnya adalah para Advokat pada Law Office Aziun Asyaari, S.H, M.H & Associate Legal Consultant, berkantor di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D-12 Kawasan Setia Maharaja, Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Nomor 2016/AA-Pdt/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 dan Nomor 6021/AA-Pdt/XI/2006 tanggal 26 Nopember 2006, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Nomor 107/2006 tanggal 12-10-2006 dan Nomor 12/2007 tanggal 25-01-2007, sedang Tergugat I, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI bertindak untuk atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.²

Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan dengan suratnya tertanggal 03 Juli 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru dengan Register Nomor 362/Pdt.G /2006/PTA.Pbr, tanggal 04 Juli 2006 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Dollah Oesman (kakek) dan almarhumah Sutinah (nenek), serta orang tua kandungnya, yaitu almarhum H. Aboe Bakar Oemar (ayah) dan almarhumah Nurani (ibu),
- 2) Bahwa Dollah Oesman dulunya bekerja sebagai Opsir Polisi di Selatpanjang, Kewedanaan Bengkalis, wafat di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1952, mempunyai isteri bernama Sutinah, wafat di Selatpanjang pada tanggal 21 April 1982, mereka meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung bernama Nurani binti Dollah Oesman dan 1 (satu) orang anak angkat bernama Aminah binti Rajiman, di mana anak kandungnya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1956,

²*Ibid.*, hlm. 2-3.

- 3) Bahwa almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, selain meninggalkan anak tunggal semata wayang bernama Nurani dan anak angkat bernama Aminah binti Rajiman, mereka juga meninggalkan harta benda, baik benda tetap berupa tanah dan bangunan serta tanam tumbuh, benda bergerak berupa peralatan dan perlengkapan rumah tangga, serta perhiasan-perhiasan emas dan intan berlian berbagai jenis dan rupa, dan harta-harta tersebut saat ini belum pernah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hukum *fara'id* (Hukum Waris Islam),
- 4) Bahwa pada saat wafat Dollah Oesman pada tanggal 23 Oktober 1952, harta benda baik tetap maupun bergerak tersebut dikuasai oleh Ny. Sutinah dan Nurani secara bersama-sama,
- 5) Bahwa sekitar tahun 1941, Nurani anak tunggal almarhum tersebut menikah dengan Aboe Bakar Oemar di Selatpanjang, terakhir H. Aboe Bakar Oemar menjabat sebagai Camat di Selatpanjang, sebagai Tokoh Masyarakat yang sangat berpengaruh di Selatpanjang khususnya dan Kabupaten Bengkalis pada umumnya,
- 6) Bahwa sejak pernikahan tersebut seluruh harta kekayaan almarhum Dollah Oesman menjadi di bawah kuasa dan pengawasan H. Aboe Bakar Oemar dan Nurani sebagai suami isteri, sekalipun Ny. Sutinah masih hidup,
- 7) Bahwa di samping itu H. Aboe Bakar Oemar, karena usaha dan penghasilannya juga banyak menambah perolehan harta, baik benda tetap berupa tanah kosong, kebun sagu, kelapa, tambak ikan dan udang, tanah perumahan dan pertokoan di Selatpanjang. Pekanbaru, Jakarta dan berbagai daerah,
- 8) Bahwa takdir Ilahi menentukan lain, yaitu Ny. Nurani ternyata lebih dahulu wafat dari pada ibunya Sutinah. Ny. Nurani wafat di Selatpanjang pada tanggal 29 Oktober 1956, yaitu berselang 4 (empat) tahun dari ayahnya Dollah Oesman, wafat di Jakarta tanggal 23 Oktober 1952,
- 9) Bahwa atas perkenan nenek Sutinah, H. Aboe Bakar Oemar menikah dengan saudara angkat Nurani atau anak angkat Sutinah sendiri, yaitu Aminah binti Rajiman, yang menurut kebiasaan dan adat Melayu dikenal dengan nama "Ganti Tikar", artinya menggantikan kedudukan saudaranya yang telah meninggal dunia,
- 10) Bahwa dari perkawinan Nurani dengan H. Aboe Bakar Oemar telah lahir 7 (tujuh) orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, yang pada waktu itu masih kecil-kecil dan masih di bawah umur, yaitu Dr. Kamaluddin, Dr. (HC) Syamsiah, Drs. H. Fachruddin, Nurbaya, Olia, Olina dan Syamsinn yang sekarang menjadi para Penggugat,

- 11) Bahwa anak-anak dari almarhumah Nurani dengan H. Aboe Bakar Oemar tersebut kemudian dipelihara oleh neneknya yang masih hidup, yaitu Sutinah, dan orang tua kandung (ayah) H. Aboe Bakar Oemar, sampai akhirnya nenek Sutinah wafat di Selatpanjang tanggal 21 April 1982, di mana anak-anak dari Nurani sudah dewasa, berumah tangga dan bekerja. Dengan demikian seluruh harta peninggalan nenek Sutinah dan almarhumah Nurani yang diperoleh selama perkawinan dengan H. Aboe Bakar Oemar dikuasai dan dikelola oleh H. Aboe Bakar Oemar dan Aminah binti Rajiman,
- 12) Bahwa semasa hidupnya H. Aboe Bakar Oemar telah tiga kali menikah, yaitu : (1) Pernikahan pertama dengan Nurani binti Dollah Oesman, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu Penggugat I s/d VII (Dr. Kamaluddin, Dr. (HC) Syamsiah, Drs. H. Fachruddin, Nurbaya, Olia, Olina dan Syamsini), (2) Pernikahan kedua dengan Aminah binti Rajiman (Tergugat I), meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yaitu turut Tergugat I s/d VIII (Anawati, Asniwati, Aswin, Minarti, Kartika Sari, Agus Yanto, Agustini dan Guntur Syaputra), (3) Pernikahan ketiga atau terakhir dengan Awiyati (Tergugat II), meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu turut Tergugat IX s/d XI (Yanuar, Aguslan dan Afrida),
- 13) Bahwa setelah wafatnya H. Aboe Bakar Oemar di Pekanbaru pada tanggal 16 Juni 2004, seluruh permasalahan harta peninggalan tersebut menjadi persoalan kewarisan yang mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan silaturrahim antara sesama para ahli waris, karena seluruh harta warisan/peninggalan almarhum H. Aboe Bakar Oemar baik fisik maupun dokumennya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I (Aminah binti Rajiman),
- 14) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 49 ayat (3), Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tentang siapa ahli waris, mengenai harta peninggalan, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta peninggalan/waris tersebut,
- 15) Bahwa harta peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah (1 unit rumah dan beberapa rumah petak sewa di Selatpanjang) serta peninggalan almarhum II. Aboe Bakar Oemar dan almarhumah Ny. Nurani (tanah kebun dan 3 petak rumah sewa di Selatpanjang serta 2 unit rumah di Pekanbaru) tersebut terdiri atas tanah dan rumah.³

³*Ibid.*, hlm. 4-5.

Adapun harta-harta warisan peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah serta peninggalan almarhum II. Aboe Bakar Oemar dan almarhumah Ny. Nurani, terdiri dari :

Harta warisan peninggalan almarhum Dollah Oesman dan Sutinah terdiri atas :

- a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 33 RT 02 RW. 04, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV). Reg. Nomor 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2 dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan,
- b. 2 (dua) petak rumah sewa yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV) Reg. Nomor 10/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas tanah \pm 184,5 M2 dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan,
- c. Rumah petak/sewa peninggalan (Surat Keterangan Tanah atas' nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), Reg. Nomor 11/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005), yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman RT. 02 RW. 05, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, dengan luas tanah + 93,38 M2 dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan,
- d. 1 (satu) petak rumah sewa (Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV) Reg. Nomor 13/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005) yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman RT. 02 RW. 05, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, dengan luas tanah + 301 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan,
- e. 1 (satu) petak rumah sewa (Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV) Reg. Nomor 14/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005) yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman RT. 02 RW. 05, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas tanah + 96,60 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, (f) 4 (empat) petak rumah sewa (Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV) Reg. Nomor 15/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005) yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman RT. 02 RW. 05, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi,

Kabupaten Bengkalis, dengan luas tanah + 368,15 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan.

- f. Bahwa harta-harta tersebut di atas (huruf a s/d f) hak para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Dollah Oesman (kakek) dan Sutinah (nenek).

Harta warisan peninggalan almarhum Aboe Bakar Oemar dan Ny. Nurani binti Dollah Oesman terdiri atas :

- 1) Sebidang tanah kebun yang terletak di Jalan Raya Gogok RT. 01 RW. 10, Kelurahan/Desa Insit, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, luas tanah + 49.029,50 M2 (Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), No. Reg: 28/SKT/02/XI/2005 tanggal 26 September 2005), dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan,
- 2) Tanah kebun yang terletak di Jalan Raya Gogok RT.01 RW. 10. Desa Insit Selatpanjang, luas tanah + 20.430 M2 (Surat aslinya ada pada Tergugat II Aminah binti Rajiman),
- 3) Tanah kebun yang terletak di Jalan Raya Gogok RT.01 RW. 10, Desa Insit Selatpanjang, luas tanah + 1.445 M2 (Surat aslinya ada pada Tergugat I/Aminah binti Rajiman),
- 4) Tanah Pabrik Batu Bata yang terletak di Desa Alai Selatpanjang, luas +3 jalur (Surat aslinya ada pada Tergugat I/Aminah binti Rajiman),
- 5) Tanah Kebun yang terletak di Desa Jelotong - Selatpanjang, luas + 60 jalur (Surat aslinya ada pada Tergugat I/Aminah binti Rajiman),
- 6) Tanah Kebun yang terletak di Desa Dorak - Selatpanjang, luas ± 7 jalur (Surat aslinya ada pada Tergugat I/Aminah binti Rajiman),
- 7) Tanah kebun yang terletak di Kampung Suak, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, atas nama A. Bakar Oemar, dengan luas 10.000 M dibeli oleh H. A. Bakar Oemar dari Iskandar. J pada tahun 1985 dengan Akta Jual Beli No. 233/PPAT/1985, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
- 8) Tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Sokop Selatpanjang, yang terdiri atas: (1) Tanah yang dibeli oleh A. Bakar Oemar dari Betik bin Awang pada tanggal 24 Juni 1969 (surat jual beli tahun 1969), yang terletak di Sondai dalam Kepenghuluan Sokop, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis dengan luas ± 10 jalur dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, (2) Tanah yang dibeli oleh A. Bakar Oemar dari Semo pada tanggal 24 Juni 1969 (Surat jual beli tahun 1969) yang terletak di Sondai dalam Kepenghuluan Sokop, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis dengan luas + 5 ½ jalur (panjang 140 depa dan lebarnya 40 depa) dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, Tanah yang dibeli oleh A. Bakar Oemar dari Jayus pada tanggal 2 Nopember 1973 (Akta jual beli No: 084/1973) yang terletak di Kampung Sokop, Kecamatan Tebing

Tinggi Kabupaten Bengkalis dengan luas 1. 2220 Ha (Dua belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, (4) Tanah yang dibeli oleh A. Bakar Oemar dari Husin pada tanggal 5 Maret 1970 (Surat jual beli tanah kosong tahun 1970) yang terletak di Sondai dalam Kepenghuluan Sokop, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas +9 ½ jalur (panjang 140 depa dan lebarnya 70 depa) dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, (5) Tanah yang dibeli oleh A. Bakar Oemar dari Ponimin pada tanggal 9 Maret 1970 (Surat Jual Beli Tanah tahun 1970) yang terletak di Sondai dalam Kepenghuluan Sokop, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas +12 ½ jalur dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, (6) Tanah yang dibeli oleh A. Bakar Oemar dari Rianto pada tanggal 6 Oktober 1973 (Surat Akta Jual Beli No: 065/1973) yang terletak di Kampung Sokop, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, dengan luas + 3, 2805 Ha (Tiga puluh dua ribu delapan ratus lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, (7) Tanah yang dibeli oleh A. Bakar Oemar dari Husin pada tanggal 11 Maret 1970 (Surat jual beli Kebun Kelapa tahun 1970) yang terletak di Kampung Sondai dalam Kepenghuluan Sokop, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas + 15 jalur dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan,

- 9) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dorak Selatpanjang, luas + 6.501,5 M2 (surat keterangan Pemakaian Tanah No. 68/1968 tanggal 15 Nopember 1968),
- 10) Sebidang tanah kebun buah-buahan di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman yang diserahkan Sutinah secara sukarela kepada A. Bakar Oemar tanggal 12 Maret 1965 (surat penyerahan sukarela Reg. No: 65/1965) yang mana sebelumnya dimiliki oleh Sutinah. Sutinah merupakan ibu kandung dari Nurani, di mana Surat Pernyataan penyerahan secara sukarela dari Sutinah ke H. Aboe Bakar Oemar diragukan oleh pihak Para Penggugat, karena saksi yang tercantum adalah Aminah (Tergugat I) sendiri, setelah isteri pertama (Nurani binti Dollah Usman) meninggal dunia, dengan luasnya +2.295 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
- 11) 1 (satu) petak rumah sewa di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman Selatpanjang, luas + 95,68 M2 dengan luas tanah + 95,68 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan,
- 12) 2 (dua) petak rumah sewa di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman Selatpanjang, luas+ 301 M2,
- 13) 1 (satu) unit Perumnas di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A.I No. 39 Pekanbaru,

- 14) 1 (satu) unit rumah di Jalan Tangkuban Perahu Timur No. 45 A Pekanbaru.
- 15) Bahwa harta-harta tersebut di atas (tanah huruf a s/d j dan Rumah huruf a s/d d) adalah hak para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta turut Tergugat I s/d IX, selaku ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Aboe Bakar Oemar (ayah dari para Penggugat dan turut Tergugat/suami dari Tergugat I dan II) dan Nurani (Ibu dari para Penggugat).
- 16) Bahwa selain itu juga mengingat harta warisan tersebut secara phisik dikuasai tergugat, maka para penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara, sebab tergugat sama sekali tidak mempunyai etikat baik.⁴

Dari kutipan di atas ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, sebagai berikut :

- a. Penggugat I sampai dengan VII (Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH bin Aboe Bakar Oemar, Dr. (HC) Syamsiah Bakar binti Aboe Bakar Oemar, Drs. H. Fachruddin Bakar bin Aboe Bakar Oemar, Nurbaya Bakar binti Aboe Bakar Oemar, Olia Bakar binti Aboe Bakar Oemar, Olina Bakar binti Aboe Bakar Oemar, Syamsini Bakar binti Aboe Bakar Oemar), mereka adalah ahli waris yang sah (cucu kandung) dari almarhum Dollah Oesman (kakek) dan almarhumah Sutinah (nenek), serta orang tua kandungnya, yaitu almarhum H. Aboe Bakar Oemar (ayah dan menantu dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah) dan almarhumah Nurani binti Dollah Oesman (ibu dan anak kandung dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah).

⁴*Ibid.*, hlm. 6-8.

- b. Tergugat I (Aminah binti Rajiman) adalah ibu tiri dari para Penggugat, atau isteri kedua dari almarhum H. Aboe Bakar Oemar (ayah), atau saudari angkat dari almarhumah Nurani binti Dollah Oesman (ibu), atau anak angkat dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah.
- c. Turut Tergugat I sampai dengan VIII (Anawati, Asniwati, Aswin, Minarti, Kartika Sari, Agus Yanto, Agustini dan Guntur Syaputra), adalah anak-anak dari Tergugat I, atau saudara-saudara tiri se-ayah (ayah ; almarhum Aboe Bakar Oemar) dari para Penggugat, atau cucu kandung dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah.
- d. Bahwa almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, selain meninggalkan anak tunggal semata wayang bernama Nurani dan anak angkat bernama Aminah binti Rajiman, mereka juga meninggalkan harta benda, baik benda tetap berupa tanah dan bangunan serta tanam tumbuh, benda bergerak berupa peralatan dan perlengkapan rumah tangga, serta perhiasan-perhiasan emas dan intan berlian berbagai jenis dan rupa, dan harta-harta tersebut saat ini belum pernah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hukum *fara'id* (Hukum Waris Islam). Seluruh harta warisan/peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah dan harta warisan/peninggalan almarhum H. Aboe Bakar Oemar baik fisik maupun dokumennya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I (Aminah binti Rajiman).
- e. Dari sejumlah harta peninggalan tersebut, terdapat 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat

Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas \pm 680 M2, Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman adalah harta peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, dan telah dihibahkan kepadanya, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976 di hadapan Camat Tebing Tinggi Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, para Penggugat tidak mengakui keberadaan harta peninggalan tersebut sebagai hibah dengan dua alasan : (1) bahwa almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah sebagai orangtua angkat tidak pernah menghibahkan hartanya tersebut kepada anak angkatnya, Aminah binti Radjiman, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar, Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2, dan (2) terdapat perbedaan tentang luas tanah yang diperselisihkan sebagai hibah, di mana dalam Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman, luas tanah \pm 680 M2 sementara dalam Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar, Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2.

2. Dasar Pertimbangan dan Keputusan Majelis Hakim

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam mengambil keputusan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 49 ayat (3), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan

memutus tentang siapa ahli waris, mengenai harta peninggalan, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta peninggalan/waris tersebut.⁵ Oleh karena itu dalam Pokok Perkara disebutkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dalam hal perkara gugatan pembagian mal waris menyatakan:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Mal Waris (Pembagian harta Warisan) dari para Penggugat,
- b. Menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari kakek “Dollah Oesman” almarhum dan nenek “Sutinah” almarhumah, serta ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya yaitu H. Aboe Bakar Oemar almarhum dan Nuraini binti Dollah Oesman almarhumah,
- c. Menetapkan harta yang termuat dalam poin 15.1 a s/d f tersebut di atas adalah warisan dari kakek “Dollah Oesman” almarhum dan nenek “Sutinah” almarhumah serta warisan dari orang tua kandung para Penggugat yaitu almarhumah Ny. Nuraini binti Dollah Oesman tersebut serta menetapkan harta yang termuat dalam poin 15.1 huruf a s/d f adalah hak dari para Penggugat,
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi milik para Penggugat (poin 15.1 huruf a s/d f) secara sekaligus atau seketika,
- e. Menetapkan harta yang termuat dalam poin 15.2 (huruf a s/d j dan rumah a s/d d) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Aboe Bakar Oemar dengan ketiga isterinya,
- f. Menetapkan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Aboe Bakar Oemar,
- g. Menyatakan harta poin 15.2 (tanah huruf a s/d j dan rumah a s/d d) adalah harta warisan dari almarhum Aboe Bakar Oemar yang belum pernah dibagi menurut hukum fara'id (hukum waris Islam) kepada seluruh ahli waris (para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat),
- h. Menetapkan dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum Aboe bakar Oemar yang disebut pada poin 15.2 (tanah huruf a s/d j dan rumah a s/d d) di atas kepada masing-masing ahli waris baik secara natura ataupun nilai jualnya,

⁵*Ibid.*, hlm. 2-3.

- i. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi milik para Penggugat (poin 15.2 tanah huruf a s/d j dan rumah a s/d d) secara sekaligus atau seketika,
- j. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga,
- k. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama ini,
- l. Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, serta demi menjamin agar tidak terjadinya perseteruan mengarah kepada perbuatan yang merugikan Penggugat I dan turut Penggugat III Rekonvensi yang lebih besar dan terus-menerus, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini diajukan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru supaya memberikan putusan :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan turut Penggugat III Rekonvensi seluruhnya,
- 2) Menyatakan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 33 RT.02 RW 04, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis seluas 680 M2 adalah milik Penggugat I Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 313 tanggal 07 April 1997, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis,
- 3) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
- 4) Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor: 362/Pdt.G/2006/PA.Pbr., tanggal 26 Juli 2007 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1428 H, yang amar selengkapannya sebagaimana dalam eksepsi :

- 1) Menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat,
- 2) Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru berwenang mengadili perkara tersebut,
- 3) Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan perkara, dan
- 4) Menyatakan, meneguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.
- 5) Menghukum Tergugat I (Aminah) untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama dan 2 (dua) petak rumah sewa di Jalan Siak Sri Indrapura, Gang Aman, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis kepada ahli waris almarhum

Aboe Bakar Oemar sesuai bagian masing-masing ahli waris tersebut, baik secara natura maupun nilai jualnya,

- 6) Menyatakan, menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya. (1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian, (2) Menyatakan 1 (satu) unit rumah di Jalan Tangkuban Perahu Timur No. 45.A adalah milik Aswin (Penggugat II Rekonvensi), (3) Menyatakan, tidak menerima dan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi : (1) Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.313.000,- (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).⁶

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapatlah diketahui bahwa keberadaan harta peninggalan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas \pm 860 M2, Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman yang merupakan harta peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, dan telah dihibahkan kepadanya, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976 di hadapan Camat Tebing Tinggi Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berpendapat bahwa hibah tersebut cacat hukum, karena: (1) terdapat perbedaan nomor dan tanggal surat dan akta hibah Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman, dan (2) Akta Hibah Nomor : 27

⁶*Ibid.*, hlm. 7-10.

Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976. Atas dasar itulah nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru kemudian memutuskan bahwa harta tersebut kembali kepada status quo dan sepenuhnya menjadi hak dari para Penggugat.

Dengan dikeluarkannya keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tersebut, maka Tergugat, Aminah binti Rajiman kemudian mengajukan perkara tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kota Pekanbaru untuk menuntut haknya secara adil sebagai anak angkat yang telah menerima hibah dari almarhum Dollah Oesman dan almarhum Sutinah.

B. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr

1. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr Dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr

Para Pembanding dalam perkara banding pembagian mal waris (Kewarisan) di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2007/PTA.Pbr, Tanggal 22 Nopember 2007, terdiri dari 7 (tujuh) orang sebagai berikut :

Bismillahirrahmanirrahim, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- a. Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH bin Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor 21, Tangkerang Selatan, Pekanbaru, disebut sebagai Pembanding I,
- b. Dr. (HC) Syamsiah Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Permatasari Nomor 2, Kelurahan Tangkerang, Pekanbaru, disebut sebagai Pembanding II,
- c. Drs. H. Fachruddin Bakar bin Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 54, Pekanbaru, disebut sebagai Pembanding III,
- d. Nurbaya Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Gang al-Ihwan Nomor 12 A, Pekanbaru, disebut sebagai Pembanding IV,
- e. Olia Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Jelatik Raya Nomor 2, Pekanbaru, disebut sebagai Pembanding V,
- f. Olina Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Melur Nomor 40 A, Pekanbaru, disebut sebagai Pembanding VI,
- g. Syamsini Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Irmala Nomor 14, Pekanbaru, disebut sebagai Pembanding VII,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : (1) H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., (2) Kurniati, S.H. dan (3) Hasan Basri, S.Ag., S.H., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syamsul Rakan Chaniago, SH & Associates, berkantor di Simpang Tiga Bussines Centre Blok A 10, Jalan Jend. Sudirman, Pekanbaru, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2005, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Nomor : 76/2006 04-07-2006, sebagai Penggugat/Pembanding.⁷

Sementara para Tergugat/Terbanding dan turut Tergugat/Terbanding terdiri dari

11 (sebelas) orang sebagai berikut :

Melawan :

- 1) Aminah binti Rajiman, bertempat tinggal di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A I Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I,
- 2) Awiwati, bertempat tinggal di Perumahan Anggrek Mas I Blok B Jalan Wortel Nomor 16 Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II,

⁷Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Riau, *Dokumentasi Putusan* Nomor 47/Pdt.G/2007/PTA.Pbr, Tanggal 22 Nopember 2007 *Tentang Kewarisan*, (Pekanbaru : PTA. Provinsi Riau, 2007), hlm. 1-2.

- 3) Hj. Anawati Bakar, BA, bertempat tinggal di Damai Langgeng Jalan Jati Blok C Nomor 02, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat I/Terbanding I,
- 4) Asniwati Bakar, B.Sc, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat II/Terbanding II,
- 5) Aswin Bakar, SH, MBA, bertempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 89 A Labuh Baru, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat III/Terbanding III,
- 6) Dra. Minarti Bakar, bertempat tinggal di Jalan Margahayu Raya Jalan Soekarno Hatta Blok A Nomor 305, Bandung, Jawa Barat, disebut sebagai Turut Tergugat IV/Terbanding IV,
- 7) Dra. Kartika Sari Bakar, bertempat tinggal di Jalan Rintis Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, disebut sebagai Turut Tergugat V/Terbanding V,
- 8) Drs. Agus Yanto Bakar, MM, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A I Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VI/Terbanding VI,
- 9) Agustini Bakar, SE, Ak, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VII/Terbanding VII,
- 10) Guntur Syahputra Bakar, bertempat tinggal Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Kota Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VIII/Terbanding VIII,
- 11) Yanuar, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Anggrek Mas I Blok C Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat IX/Terbanding IX,
- 12) Aguslan, bertempat tinggal di Jalan Dorak Nomor 2 Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, disebut sebagai Turut Tergugat X/Terbanding X,
- 13) Afrida, SE, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Anggrek Mas I Blok B Nomor 16 Jalan Wortel Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat XI/Terbanding XI,

Dalam hal ini Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, telah memberi kuasa kepada : (1) Aziun Asyaari, S.H., M.H., (2) Edi Azmi, S.H., (3) M. Amin, S.H., dan Zulkhairi, S.H., keempatnya adalah para Advokat pada Law Office Aziun Asyaari, S.H, M.H & Associate Legal Consultant, berkantor di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D-12 Kawasan Setia Maharaja, Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Nomor 2016/AA-Pdt/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 dan Nomor 6021/AA-Pdt/XI/2006 tanggal 26 Nopember 2006, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Nomor 107/2006 tanggal 12-10-2006 dan Nomor 12/2007 tanggal 25-01-2007, sedang Tergugat I, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI bertindak untuk atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding.⁸

Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya menetapkan harta-harta di antaranya adalah harta warisan peninggalan almarhum Dollah Oesman dan Sutinah berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 33 RT 02 RW. 04, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis.⁹ Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dalam membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr yang berisi : (1) Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima, (2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr Tanggal 26 Juli 2007 tanggal 26 Juli 2007M, bersamaan dengan tanggal 1 Rajab 1428 H : (a) Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat, (b) Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, (c) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.323.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dan

⁸*Ibid.*, hlm. 2-3.

⁹*Ibid.*, hlm. 5.

(3) Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapatlah diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau telah membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dan di antara isinya adalah mengembalikan hak milik atas nama Aminah binti Rajiman berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas \pm 680 M2, Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman adalah harta peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, dan telah dihibahkan kepadanya, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976 di hadapan Camat Tebing Tinggi Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis.

2. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 568 K/AG/2008 Dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr

Para Pemohon Kasasi dalam perkara perdata agama tingkat kasasi pembagian mal waris (Kewarisan) di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 568 K/AG/2008, Tanggal 5 Desember 2008, terdiri dari 7 (tujuh) orang sebagai berikut :

Bismillahirrahmanirrahim, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara

¹⁰*Ibid.*, hlm. 12.

perdata agama pada tingkat kasasi, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

- a. Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH bin Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor 21, Tangkerang Selatan, Pekanbaru,
- b. Dr. (HC) Syamsiah Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Permatasari Nomor 2, Kelurahan Tangkerang, Pekanbaru,
- c. Drs. H. Fachruddin Bakar bin Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 54, Pekanbaru,
- d. Nurbaya Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Gang al-Ihwan Nomor 12 A, Pekanbaru,
- e. Olia Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Jelatik Raya Nomor 2, Pekanbaru,
- f. Olina Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Melur Nomor 40 A, Pekanbaru,
- g. Syamsini Bakar binti Aboe Bakar Oemar, bertempat tinggal di Jalan Irmala Nomor 14, Pekanbaru, disebut sebagai Pembanding VII,

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : (1) H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., (2) Kurniati, S.H. dan (3) Hasan Basri, S.Ag., S.H., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syamsul Rakan Chaniago, SH & Associates, berkantor di Simpang Tiga Bussines Centre Blok A 10, Jalan Jend. Sudirman, Pekanbaru, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2005, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Nomor : 76/2006 04-07-2006, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding.¹¹

Sementara para Tergugat/Terbanding dan turut Tergugat/Terbanding terdiri dari

11 (sebelas) orang sebagai berikut :

Melawan :

- 1) Aminah binti Rajiman, bertempat tinggal di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A I Nomor 39, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : (1) Aziun Asyaari, S.H., M.H., (2) Edi Azmi, S.H., (3) M. Amin, S.H., dan Zulkhairi, S.H., keempatnya adalah para Advokat pada Law Office Aziun Asyaari, S.H, M.H & Associate Legal Consultant, berkantor di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D-12 Kawasan Setia Maharaja, Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru, Riau,

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), *Dokumentasi Putusan Nomor 568 K/AG/2008, Tanggal 5 Desember 2008 Tentang Kewarisan*, (Jakarta : MA RI, 2008), hlm. 1-2.

- 2) Awiwati, bertempat tinggal di Perumahan Anggrek Mas I Blok B Jalan Wortel Nomor 16 Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II,
- 3) Hj. Anawati Bakar, BA, bertempat tinggal di Damai Langgeng Jalan Jati Blok C Nomor 02, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat I/Terbanding I,
- 4) Asniwati Bakar, B.Sc, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat II/Terbanding II,
- 5) Aswin Bakar, SH, MBA, bertempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 89 A Labuh Baru, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat III/Terbanding III,
- 6) Dra. Minarti Bakar, bertempat tinggal di Jalan Margahayu Raya Jalan Soekarno Hatta Blok A Nomor 305, Bandung, Jawa Barat, disebut sebagai Turut Tergugat IV/Terbanding IV,
- 7) Dra. Kartika Sari Bakar, bertempat tinggal di Jalan Rintis Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, disebut sebagai Turut Tergugat V/Terbanding V,
- 8) Drs. Agus Yanto Bakar, MM, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A I Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VI/Terbanding VI,
- 9) Agustini Bakar, SE, Ak, bertempat tinggal di Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VII/Terbanding VII,
- 10) Guntur Syahputra Bakar, bertempat tinggal Jalan Meranti Blok A Nomor 39, Kota Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat VIII/Terbanding VIII,
- 11) Yanuar, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Anggrek Mas I Blok C Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat IX/Terbanding IX,
- 12) Aguslan, bertempat tinggal di Jalan Dorak Nomor 2 Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, disebut sebagai Turut Tergugat X/Terbanding X,
- 13) Afrida, SE, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Anggrek Mas I Blok B Nomor 16 Jalan Wortel Arengka, Pekanbaru, disebut sebagai Turut Tergugat XI/Terbanding XI.¹²

¹²*Ibid.*, hlm. 2-3.

Adapun keputusan kasasi Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006/PA.Pbr, dalam hal ini 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas \pm 860 M2, Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman, disebutkan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar harta peninggalan yang di maksud para Penggugat Konvensi pada poin 15 (15.1, huruf a s/d f) adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Dollah Oesman dan Sutinah dengan uraian bahwa harta warisan peninggalan almarhum Dollah Oesman dan Sutinah : Bahwa tidak benar 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 33 RT. 02 RW. 04, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV) Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas + 866 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan eksepsi, adalah milik para Penggugat Konvensi, karena rumah yang terletak di sebidang tanah tersebut adalah milik Aminah (Tergugat I Konvensi), di mana tanah dan rumah tersebut diperoleh dari Penggugat II Konvensi berdasarkan Akta Hibah Nomor 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976 di hadapan Camat Tebingtinggi Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1991 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah untuk wilayah Kecamatan Tebingtinggi; Bahwa tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 33 tersebut sudah disertifikatkan atas nama Aminah (Tergugat I Konvensi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 313 tanggal 7 April 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Bengkalis; Bahwa untuk itu Surat Keterangan Tanah Reg. No: 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005 yang dinyatakan oleh Para Penggugat Konvensi dalam gugatan ini telah dibatalkan oleh Lurah Selatpanjang berdasarkan Surat No: 85/ KLSK/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006.¹³

¹³*Ibid.*, hlm. 11-12.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dengan putusan Nomor: 47/Pdt.G/2007/PTA.Pbr., tanggal 14 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1429 H, yang amar selengkapanya :

- (1) Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima,
- (2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Nomor: 362/Pdt.G/2006/PA.Pbr., tanggal 26 Juli 2007 M, bersamaan dengan tanggal 11 Rajab 1428 H, dan dengan mengadili sendiri :
 - (1) Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat,
 - (2) Menyatakan, bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima,
 - (3) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.313.000,- (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah),
 - (4) Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).¹⁴

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 16 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 362/Pdt.G/2006/PA.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Juli 2008. Bahwa setelah itu kepada para Tergugat/para Terbanding

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12-15.

yang pada tanggal 17 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru pada tanggal 29 Juli 2008. Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Dalam Eksepsi:

- 1) Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat berpendapat *judex facti* (putusan Pengadilan Agama Pekanbaru) telah sangat keliru; Bahwa *judex facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya (*vide* pertimbangan hal. 10 alinea ke- 3 s/d 5 dan hal. 11 alinea ke-1 dan ke-5),
- 2) Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat berpendapat gugatan para Penggugat sudah sangat jelas dan tidak ada yang kabur serta tidak ada yang cacat formil, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi untuk mengoreksi putusan banding tersebut di atas, yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat termasuk yang tidak dieksepsi oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Tergugat,
- 3) Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap berpendapat tentang penitipan uang sewa pada Pengadilan Agama Pekanbaru, dan menunjuk hakim pengawas. Bahwa *judex facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan gugatan provisi para Pemohon Kasasi/para Penggugat terdapat cacat formil (*vide* pertimbangan hal. 12),
- 4) Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap berpendapat gugatan provisi tidak terdapat cacat formil, seharusnya dikabulkan oleh Majelis *quad non*, karena uang sewa rumah petak warisan almarhum Aboe Bakar Oemar masih diambil oleh turut Tergugat III sampai dengan sekarang. Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi untuk mengoreksi putusan a quo tersebut ;
- 5) Dalam Sita Jaminan, Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap berpendapat tentang permohonan para Pemohon Kasasi/para

Penggugat mengenai sita jaminan atas harta warisan harus dikabulkan, Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap berpendapat tentang permohonan Sita Jaminan atas harta warisan harus dikabulkan, karena dari awal atau sejak meninggalnya Aboe Bakar Oemar, para Tergugat mengaburkan atau menghilangkan surat-surat atau dokumen harta warisan almarhum Dollah Oesman (kakek para Pemohon Kasasi/para Penggugat) dan almarhumah Sutinah (nenek para Pemohon Kasasi/para Penggugat), almarhum Aboe Bakar Oemar (suami Tergugat I & II/ayah Para Penggugat dan para turut Tergugat) dan almarhumah Nurani binti Dollah Oesman (isteri I Aboe Bakar Oemar/ibu para Penggugat). Bahkan selama persidangan ini berlangsung di Pengadilan Agama Pekanbaru Tergugat I sebagai yang mengerti permasalahan ini tidak pernah hadir, meskipun para Pemohon Kasasi/para Penggugat melalui Majelis Hakim telah minta kepada kuasa hukumnya supaya dihadirkan dalam persidangan, namun tetap tidak dihadirkan. Mengingat selama proses persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru Majelis quod non tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat, padahal menurut hukum acara perdata pemeriksaan tersebut sangat perlu dilakukan. Oleh karenanya mohon kiranya majelis hakim kasasi untuk mengkoreksi putusan a quo tersebut, (4) Bahwa yang menjadi objek gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, adalah: (a) Harta warisan peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah terdiri atas:

- a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 33 RT.02 RW.04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam memori kasasi,
- b. 2 (dua) petak rumah sewa yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), Reg. No. 10/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 184,5 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam memori kasasi,
- c. Rumah petak/sewa peninggalan (Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), Reg. No. 11/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005), yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman RT. 02 RW.05, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, dengan luas \pm 93,38 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam memori kasasi;
- d. 1 (satu) petak rumah sewa (Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), Reg. No. 13/SKT/KTT/2005

- tanggal 27 September 2005) yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, dengan luas ± 301 M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam memori kasasi,
- e. 1 (satu) petak rumah sewa (Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), Reg. No. 14/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005) yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman RT. 02 RW.05, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, dengan luas $\pm 96,60$ M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam memori kasasi;
 - f. 4 (empat) petak rumah sewa (Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), Reg. No. 15/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005) yang terletak di Jalan Siak Sri Indrapura Gang Aman RT. 02 RW. 05, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, dengan luas $\pm 368,15$ M2 dengan batas-batas sebagaimana dalam memori kasasi,
- 6) Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pertimbangan hal. 40 paragraf 4; Dalam hal ini pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum; karena pertimbangan Majelis tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Dalam hal ini keterangan saksi tersebut ada menjelaskan mereka mendengar, melihat sendiri rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 33 RT.02 RW.04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, dimana pada waktu itu usia para saksi masih sekolah rakyat sering melewati di depan rumah tersebut, pada waktu itu almarhum Dollah Oesman sebagai kepala Opsir di Selat Panjang. Di rumah tersebut tinggal almarhum Dollah Oesman dan istrinya serta anak tunggalnya almarhumah "Nurani dan suaminya almarhum Aboe Bakar Oemar serta anak-anaknya." Sebagai mana foto yang ada pada bukti P. 14,
 - 7) Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pertimbangan hal. 41 paragraf 1; Dalam hal ini pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum; karena harta tersebut bukanlah harta bersama antara Aboe Bakar Oemar dengan Aminah (Tergugat I). karena fakta hukumnya harta tersebut merupakan harta bawaan dari almarhumah isteri pertama Aboe Bakar Oemar yaitu Nurani binti Dollah Oesman atau warisan dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Soetinah. Dengan demikian yang sangat berhak adalah Para Penggugat sebagai cucu-cucu dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Soetinah,
 - 8) Bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pertimbangan hal. 41 paragraf 2 s/d 4; Dalam hal ini pertimbangan tersebut adalah tidak

tepat dan tidak benar menurut hukum. Dalam hal ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat mengurus keluarnya Surat Keterangan Tanah tersebut di atas, dikarenakan para Pemohon Kasasi/para Penggugat pernah menanyakan tentang surat-surat tanah dimaksud kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I, namun Termohon Kasasi I/Tergugat I mengatakan kepada kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat surat-surat tentang tanah tersebut telah hilang, maka sudah seharusnya Surat Keterangan II/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, untuk bukti objek sengketa angka 15.1.c. dan seterusnya Surat Keterangan tanah No. Reg. 13/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, Surat Keterangan Tanah Reg. No. 14ST/KTT/2005 tanggal 27 September 2005 dan Surat Keterangan Tanah No. Reg. 15/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005 tanggal 27 September 2007 harus dipertimbangkan. Oleh karenanya para Pemohon Kasasi/para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim untuk mengoreksi pertimbangan tersebut di atas,

- 9) Bahwa Pengadilan Pekanbaru dalam pertimbangan hal. 43 paragraf 10; Dalam hal ini pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, karena pertimbangan Majelis tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Dalam hal ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap berpendapat 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Tangkuban Perahu Timur No. 45 A Pekanbaru, adalah milik alm. Aboe Bakar Oemar. Karena faktanya uang yang dipergunakan untuk pembelian rumah tersebut adalah uang dari alm. Aboe Bakar Oemar (bapak para Penggugat/bapak turut Tergugat/suami para Tergugat), karena turut Tergugat III pada saat itu tidak bekerja (masih sekolah); Dalam Rekonvensi,
- 10) Bahwa Pengadilan Agama dalam pertimbangan hal. 45 paragraf 1; Dalam hal ini pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum; karena pertimbangan Majelis tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Dalam hal ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap berpendapat 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar No : 33 RT.02 RW.04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar (Penggugat IV), Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2, bukan 680 M2 seperti yang tercantum dalam Sertifikat No. 313, tertanggal 7 April 1997 (atas nama Aminah/Tergugat I), karena lahirnya sertifikat tersebut menurut jawaban Tergugat karena adanya hibah dari Penggugat II (Syamsiah Bakar). Dalam persidangan pihak para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah membantah tentang hibah tersebut karena tidak pernah ada sama sekali Penggugat II menghibahkan kepada siapapun tanah warisan

dari ibunya (almarhumah Nurani) anak almarhum Dollah Oesman (kakek) dan almarhumah Sutinah (nenek). Dalam pertimbangannya pun Majelis a quo berpendapat hibah tersebut cacat hukum. Dengan demikian tentunya status tanah kembali kepada status quo sebagaimana bukti P. 14 dan sepenuhnya menjadi hak dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat,

- 11) Bahwa Pengadilan Agama dalam pertimbangan hal. 45 paragraf 2; Dalam hal ini pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, karena pertimbangan Majelis tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Dalam hal ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap berpendapat 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Tangkuban Perahu Timur No. 45 A Pekanbaru, adalah milik alm. Aboe Bakar Oemar. Karena faktanya uang yang dipergunakan untuk pembelian rumah tersebut adalah uang dari alm. Aboe Bakar Oemar (bapak para Penggugat/bapak turut Tergugat/ suami para Tergugat), karena Penggugat II Rekonvensi/ Turut Tergugat III Konvensi pada saat itu tidak bekerja (masih sekolah). Oleh karenanya tentu ada hak para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi.¹⁵

Terkait dengan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung RI kemudian berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11: bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH bin Aboe Bakar Oemar tersebut harus ditolak.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15-18.

Oleh karena permohonan para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.¹⁶

C. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Kota Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr dan Mahkamah Agung RI Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr

Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Objek Gugatan Berada di Luar Wilayah Hukum

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, yang pertama adalah karena objek gugatan tersebut, dalam hal ini 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas \pm 860 M2, Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman, berada di luar wilayah hukum

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15-20.

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dan berada dalam wilayah hukum

Pengadilan Agama Selatpanjang. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagaimana dalam eksepsi : Kewenangan relatif bahwa objek gugatan harta warisan yang diajukan Para Penggugat dalam Posita gugatan pada halaman 3 poin 15, adalah benda yang tidak bergerak yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang; Bahwa andai kata *quad non* ada 2 objek sengketa yang terletak di wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru, yang tertera pada halaman 6 poin 15. 2 huruf c dan 15.2 huruf d adalah milik pribadi Tergugat I dan Turut Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4614 dan Sertifikat Hak Milik No. 209 (terlampir); Bahwa oleh karena objek gugatan harta warisan adalah harta benda tidak bergerak yang diajukan oleh Para Penggugat yang terletak di wilayah Pengadilan Agama Selatpanjang, maka seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama Selatpanjang. Hal ini berdasarkan Pasal 142 R.Bg ayat (5) yang menyatakan : "Apabila yang hendak dituntut adalah suatu barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*) maka tuntutan dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana letak barang yang tidak bergerak itu, apabila barang-barang yang tidak bergerak itu terletak dalam daerah yang mempunyai lebih dari satu Pengadilan Negeri, tuntutan diajukan kepada Ketua dari salah satu Pengadilan Negeri itu, menurut kehendaknya/ pilihannya si Penggugat."¹⁷

Oleh karena itulah, Mahkamah Agung RI berdasarkan uraian-uraian tersebut maka beralasan bahwa hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, yang kedua adalah karena gugatan tersebut kabur

¹⁷ PTA. Pekanbaru, *op. cit.*, hlm. 10. Mahkamah Agung RI, *ibid.*, hlm. 4.

(*Obscuur Libel*). Sebab, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Juni 1975 Nomor: 616 K/Sip/1972 "Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima" hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya Hal ini sebagai dijelaskan sebagai berikut :

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) :

- 1) Bahwa di dalam HIR/RIB tidak kita temukan istilah "turut Tergugat" dan khususnya dalam Hukum Acara Perdata Agama mengenai "kewarisan" semua ahli waris merupakan pihak yang harus diikutsertakan dalam perkara a quo, sehingga istilah turut Tergugat yang digunakan oleh para Penggugat tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dinyatakan Penggugat di dalam gugatan,
- 2) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Juni 1975 Nomor: 616 K/Sip/1972 "Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima" hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya,
- 3) Bahwa para Penggugat tidak jelas, dalam membuat dalil-dalil gugatan mengenai pengklasifikasian harta yang merupakan harta warisan dan yang bukan harta warisan bagi para Penggugat,
- 4) Bahwa para Penggugat tidak jelas dalam membuat gugatan di mana tidak menjelaskan secara terperinci mana harta warisan, harta bersama maupun harta milik pribadi dari para Tergugat yang merupakan isteri kedua dan anak-anak dari almarhum H. Aboe Bakar Oemar dengan Hj. Aminah (Tergugat I),
- 5) Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 440 K/Pdt/1988 tanggal 14 Agustus 1990 "Dalam hal terbentuknya harta gono gini yang terpisah dalam perkawinan pertama dan kedua, anak-anak dari masing-masing perkawinan berhak atas gono gini orang tuanya masing-masing (Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)",
- 6) Bahwa para Penggugat tidak jelas dalam membuat dalil-dalil posita gugatan mengenai subjek dalam perkara a quo di antaranya pada poin 16 yang menuliskan kata "Tergugat" sehingga terdapat keraguan/kerancuan Tergugat mana yang sebenarnya dimaksud oleh para Penggugat oleh karena dalam perkara a quo terdiri dari 2 Tergugat dan 11 Turut Tergugat,

- 7) Bahwa selain itu di dalam provisi menuliskan kata "Penggugat" seolah-olah dalam perkara a quo hanya terdiri dari satu Penggugat (Penggugat Tunggal) sehingga dapat ditarik kesimpulan hal tersebut bukanlah kepentingan dari seluruh para Penggugat dalam perkara a quo,
- 8) Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 No. 565/ K/Sip/1973 tentang "pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";
- 9) Bahwa para Penggugat tidak jelas, dalam merumuskan gugatan mengenai luas batasan (batas sempadan) dari tanah sengketa sesuai dalam posita gugatan,
- 10) Bahwa Posita gugatan pada poin 15.1 huruf c luas batasan sempadan pada Surat Keterangan Tanah tidak ada dan batas sebelah Selatan antara Surat Keterangan Tanah tertera nama "ELMA" tetapi di dalam posita gugatan tertera nama "APIN",
- 11) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 "Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur",
- 12) Bahwa para Penggugat tidak jelas dalam merumuskan Petitum gugatan, hal ini terdapat pada poin 3 dan poin 5 tanpa menguraikan secara jelas dan terperinci keterangan harta (objek sengketa) yang merupakan harta warisan yang di maksud oleh para Penggugat,
- 13) Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 "gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima,
- 14) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) maka beralasan hukum, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).¹⁸

3. Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor

¹⁸ *Ibid.*, Mahkamah Agung RI, *ibid.*, hlm. 6-7.

362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, yang ketiga adalah karena dalam gugatan tersebut Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Sebab, menurut Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546/K/SIP/1984 tanggal 31 Agustus 1985 sebagai berikut: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua yang berkepentingan dalam masalah ini." Hal ini sebagai dijelaskan sebagai berikut :

Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- a. Bahwa tanah/kebun yang terletak di Desa Jelotong Selatpanjang, luas + 60 jalur merupakan milik Khalijah dari warisan H. Abdullah yang diberikan kepada H. Aboe Bakar Oemar dan Mariyam anak Wan Mahayu,
- b. Bahwa para Penggugat seharusnya mengikutsertakan Mariyam dan Khalijah sebagai Tergugat dalam perkara a quo agar semua yang berkepentingan dalam perkara ini diikutsertakan,
- c. Bahwa menurut Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 bahwa "Tuntutan dalam petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak digugat semua yang berkepentingan dalam perkara ini",
- d. Bahwa menurut Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546/K/SIP/1984 tanggal 31 Agustus 1985 sebagai berikut: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua yang berkepentingan dalam masalah ini."¹⁹

4. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr yang keempat adalah karena para Penggugat tidak mempunyai kualitas. Hal ini sebagai dijelaskan sebagai berikut :

Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas :

¹⁹*Ibid.*, hlm. 11. Mahkamah Agung Ri, *ibid.*, hlm. 8-10.

- a. Bahwa sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 33 RT. 02 RW. 04, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis seluas 680 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 313 tanggal 07 April 1997 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada halaman 3 poin 15.1 huruf a adalah milik dari Hj. Aminah Bakar (Tergugat I),
- b. Bahwa sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A No. 39 Pekanbaru seluas 187 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4614 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 18 November 2000 Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo dengan Akta Jual Beli No: 346/JB/Tampan/2000 sebagaimana yang dinyatakan oleh para Penggugat pada halaman 6 poin 15.2 rumah huruf c adalah milik Hj. Aminah Bakar (Tergugat I),
- c. Bahwa sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jalan Tangkuban Perahu Timur No. 45 A, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru seluas 141 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 209 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 1992 dengan Akta Jual Beli No. 191/Lim-18/1992 sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada halaman 6 poin 15.2 rumah huruf d adalah milik Aswin Bakar (Turut Tergugat III),
- d. Bahwa dalil gugatan para Penggugat Konvensi tidak jelas dan terperinci yang menyatakan "karena usaha dan penghasilan almarhum H. Aboe Bakar Oemar juga banyak menambah perolehan harta baik benda tetap berupa tanah kosong, kebun sagu, kelapa dan tambak ikan dan udang, tanah perumahan dan pertokoan di Selatpanjang, Pekanbaru, Jakarta dan berbagai daerah" adalah harta pada masa pernikahan yang pertama, kedua atau yang ketiga, sehingga jelas disini gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima,
- e. Bahwa benar atas perkenan Nenek Sutinah, H. Aboe Bakar Oemar menikah dengan saudara angkat Nurani atau anak angkat Sutinah sendiri yaitu Aminah binti Rajiman (Tergugat I Konvensi) yang menurut kebiasaan dan adat melayu dikenal dengan nama "Ganti Tikar" artinya menggantikan kedudukan saudaranya yang telah meninggal dunia,
- f. Bahwa benar dari perkawinan Nurani dengan H. Aboe Bakar Oemar telah lahir 7 (tujuh) orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan yang pada waktu itu masih kecil-kecil dan masih di bawah umur yaitu Dr. Kamaluddin, Dr.

- (Hc) Syamsiah, Drs. H. Fachruddin, Nurbaya, Olia, Olina dan Syamsini yang sekarang menjadi Para Penggugat Konvensi,
- g. Bahwa para Penggugat Konvensi telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum menyatakan "seluruh harta peninggalan almarhumah Nenek Sutinah dan almarhumah Nurani yang diperoleh selama perkawinan dengan H. Aboe Bakar Oemar dikuasai dan dikelola oleh H. Aboe Bakar Oemar dan Aminah,"
 - h. Bahwa sesuai dengan kenyataan yang ada H. Aboe Bakar dan Aminah (Tergugat I Konvensi) hanya mengelola harta bersama yang telah diperoleh semasa pernikahannya, jadi tidak berdasarkan hukum para Penggugat Konvensi mendalilkan gugatan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedudukan Tergugat I Konvensi,
 - i. Bahwa andai kata *quad non*, pernikahan H. Aboe Bakar Oemar dengan Nurani telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, tidaklah masuk di akal para Penggugat tidak mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya yang harus mereka kelola dan kuasai untuk memenuhi kebutuhan hidup para Penggugat Konvensi . Jadi tidak benar seluruh harta peninggalan Nenek Sutinah dan almarhumah Nurani telah dikuasai oleh H. Aboe Bakar Oemar dan Aminah binti Rajiman (Tergugat I Konvensi),
 - j. Bahwa benar semasa hidupnya H. Aboe Bakar Oemar telah menikah beberapa kali yaitu: (1) Pernikahan Pertama dengan Nurani binti Dollah Oesman, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu Penggugat I s/d VII Konvensi (Dr. Kamaluddin, Dr. (HC) Syamsiah, Drs. H. Fachruddin, Nurbaya, Olia, Olina dan Syamsini), (2)Pernikahan kedua dengan Aminah binti Rajiman (Tergugat I Konvensi) meninggalkan 8 (delapan), orang anak yaitu turut Tergugat I s/d VIII Konvensi (Hj. Anawati Bakar, BA, Asniwati Bakar, BSc, Aswin Bakar, SH, MBA, Dra. Minarti Bakar, Drs. Kartika Sari Bakar, Drs. Agus Yanto, MM, Agustini Bakar, SE.Ak, Serma Guntur Syahputra Bakar), (3) Pernikahan ketiga atau terakhir dengan Awiwati (Tergugat II Konvensi), meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu turut Tergugat IX s/d XI Konvensi (Yanuar, Serma Aguslan dan Afrida, SE),
 - k. Bahwa Posita gugatan pada poin 13, para Penggugat Konvensi terlalu mengada-ada, karena yang sebenarnya adalah setelah almarhum H. Aboe Bakar Oemar wafat, telah pernah beberapa kali diadakan perundingan antara pihak para Penggugat Konvensi dengan para Tergugat Konvensi, tetapi tidak membuahkan hasil. Dan yang terakhir

diadakan perundingan di rumah pihak Penggugat III Konvensi, H. Fachruddin Bakar Jalan Sutomo No. 54 Pekanbaru.²⁰

Berdasarkan pertimbangan : (1) objek gugatan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama, (2) gugatan kabur, (3) kurang para penggugat, dan (4) penggugat tidak berkualitas, Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, dalam hal ini 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas ± 860 M², Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 tetap sebagai hak waris dan hak milik atas nama Aminah binti Radjiman sebagai hibah dari orangtua angkatnya, almarhum Dollah Usman dan almarhumah Sutinah.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor: 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr Tentang Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat

Dalam Hukum Kewarisan Islam, ada beberapa sebab yang dijadikan seseorang bisa menjadi ahli waris yaitu :

- 1) Karena Adanya Hubungan Darah; Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat (1) menggolongkan ahli waris menurut hubungan darah ini kedalam 2 (dua) golongan yaitu : (1) Golongan laki-laki, yang terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, (2) Golongan perempuan, yang

²⁰*Ibid.*, hlm. 8-10.

terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Namun demikian apabila semua ahli waris di atas semuanya ada maka yang berhak mendapat warisan yaitu : “Anak, ayah, ibu, Janda atau duda.”²¹ Menurut pandangan al-Syafi'i dan ahli-ahli fiqih, karena orang yang hubungan darah lebih dekat dengan pewaris akan menutup (menghijab) orang yang hubungan darahnya lebih jauh.²²

- 2) Karena Hubungan Perkawinan; Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.
- 3) Karena Hubungan Agama ; Antara pewaris dan ahli waris harus seiman, jika keduanya berbeda agama maka tidak akan menimbulkan hak kewarisan sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Umar yang menyampaikan perkataan Rasulullah SAW bahwa “Tidak saling mewaris antara dua pemeluk yang berbeda.”²³
- 4) Karena Wasiat ; Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain yang dilaksanakan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga. Karena ada di antara

²¹Abdurrahman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Presindo, 1995), KHI Pasal 174 Ayat (1).

²²Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2008), hlm. 10.

²³*Ibid.*, hlm. 9.

anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan tetapi ia mempunyai andil yang cukup banyak atas perolehan harta tersebut maka dapat diatasi dengan adanya wasiat ini.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat wasiat: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia, (4) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau dihadapan Notaris, (5) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, (6) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, (7) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan Notaris, dan (8) Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.²⁴

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam

²⁴Abdurrahman, *op. cit.*, KHI Pasal 194-195.

adalah hubungan darah/nasab/keturunan.²⁵ Demikian juga halnya dalam kasus Aminah binti Rajiman yang merupakan anak angkat dari almarhun Dollah Oesman dan Sutinah. Apapun alasannya, ia tetap sebagai anak angkat yang tidak membawa pengaruh hukum terhadap statusnya karena tidak ada hubungan darah dengan orangtua angkatnya, dan karena itu ia tidak menjadi ahli waris sebagaimana yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Patut diakui bahwa peristiwa pengangkatan anak oleh almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah terhadap Aminah binti Rajiman telah terjadi jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam ditetapkan sebagai Fikihnya umat Islam di Indonesia.²⁶ Walaupun demikian, dalam kasus pemberian hak waris Aminah binti Rajiman sebagai anak angkat dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah jika ditinjau dari sudut pandang aturan hukum di Indonesia nampaknya mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Bab I, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 211 sampai dengan Pasal 214, sebagai berikut :

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki, (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Warga negara Indonesia

²⁵Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 221.

²⁶Dengan keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.

yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.²⁷

Demikian juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHP) Pasal 957 yang menyatakan :

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.²⁸

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 sebagai berikut :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”²⁹

Istilah Wasiat Wajibah tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga sewaktu istilah ini muncul diartikan sebagai wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan, padahal pengertian ini kurang tepat atau tidak tepat artinya, istilah wasiat wajibah merupakan istilah tersendiri yang pengertiannya hukum wasiat yang wajib. Oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian, sebagai berikut:

- a. Wasiat wajibah adalah yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang

²⁷*Ibid.*, hlm. 171-172.

²⁸M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta; Akademika Presindo, 1985), hlm. 26.

²⁹Abdurrahman, *op. cit.*, Pasal 209 Ayat 2.

telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Suatu wasiat, disebut sebagai wasiat wajibah karena dua adanya hal : (1) Hilangnya unsur ihtiyar bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsur kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan sipenerima wasiat, (2) Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki- laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.³⁰

- b. Makna wasiat wajibah, seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukuman itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.³¹
- c. Wasiat wajibah adalah interpretasi atau bahkan pelaksanaan firman Allah di dalam al-Qur'an (QS. al- Baqarah: 180-181), sedangkan inti ayat ini yaitu orang yang merasa dekat dengan ajalnya, sementara ia memiliki harta peninggalan yang cukup banyak, maka ia wajib melakukan wasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bahwa orang yang mengubah isi wasiat tersebut maka menanggung akibatnya.³²

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 462.

³¹M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempotifkan Abtraksi Hukum Islam*, Dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam INTEM Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 71.

³²A. Wasit Alawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 65.

Jika ada anak angkat maka ada orang tua angkat, dalam hal ini, KHI menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, sebagaimana tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³³ Dengan pasal 171 dan pasal 209 KHI ini dapat dipahami bahwa : (1) Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan, pemeliharaan hidup sehari-hari, tanggung jawab biaya pendidikan, (2) Keabsahan status anak angkat harus berdasarkan atas keputusan pengadilan, dan (3) Di samping pasal 171 pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.³⁴

Status anak angkat tidak berkedudukan sebagaimana anak kandung, oleh karena itu orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, akan tetapi, kenyataan hubungan itu tidak dapat dipungkiri secara hukum, karena itu untuk tidak membohongi diri atas fakta yuridis tersebut pasal 209 (2) KHI memodifikasi suatu kesimpulan hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris muwaris adalah sebagai berikut: (a) anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan kontuksi hukum wasiat wajibah, (b) orang tua angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan kontuksi hukum wasiat wajibah.³⁵ Berhubungan dengan bunyi pasal 205 KHI dapat dipahami sebagai berikut : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176-193

³³Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 164.

³⁴M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 67.

³⁵*Ibid.*, hlm. 71.

tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁶

Dengan begitu KHI menjelaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengetahuan tentang baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, oleh karena itu hubungan antara keduanya dikukuhkan dengan perantara wasiat wajibah. Pengertian wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dapat mencegah atau menghindari konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut, sebagaimana kasus sengketa pemberian hak waris anak angkat Aminah binti Rajiman anak angkat dari almarhum Dollah Oesman dan Sutinah, yang kemudian digugat oleh ahli waris/anak cucu dari almarhum dan almrhumah sendiri.

Objek gugatan yang menjadi sengketa pemberian hibah kepada anak angkat atas nama Aminah binti Rajiman adalah harta peninggalan berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas ± 680 M2, Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama

³⁶Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 164.

Aminah binti Radjiman adalah harta peninggalan almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, dan telah dihibahkan kepadanya, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976 di hadapan Camat Tebing Tinggi Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis. Sementara ahli waris tidak mengakui keberadaan harta peninggalan tersebut sebagai hibah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar, Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas \pm 866 M2, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sebagaimana Keputusan Nomor: 362/Pdt.G /2006/PA.Pbr., tanggal 26 Juli 2007, berpendapat bahwa hibah tersebut cacat hukum karena: (1) terdapat perbedaan nomor dan tanggal surat dan akta hibah Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman, dan (2) Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976, sehingga diputuskan bahwa harta tersebut kembali kepada status quo dan sepenuhnya menjadi hak dari para Penggugat.

Dalam perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau membatalkan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan Putusan Keputusan Nomor: 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr Tanggal 14 Mei 2008 tentang Kewarisan. Sementara dalam perkara kasasi, setelah Mahkamah Agung RI memeriksa, menimbang dan mengadili akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, dengan Putusan Nomor 568 K/AG/2008, dengan pertimbangan bahwa : (1) objek gugatan berada

di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, (2) gugatan kabur, (3) kurang para penggugat, dan (4) penggugat tidak berkualitas.

Alasan pertama yang dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah karena objek gugatan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Terkait dengan wilayah hukum, dalam hal ini wewenang Pengadilan Agama ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.” Dengan demikian, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sesungguhnya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan berada dalam wilayah hukum di mana para Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah tersebut, walaupun objek gugatan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berhak memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan kaum Muslim dalam bidang-bidang tertentu, yakni bidang perkawinan dan berbagai hal yang terkait dengannya, bidang kewarisan dan berbagai hal yang terkait dengannya, serta bidang perwakafan dan berbagai hal yang terkait dengannya. Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan keluarnya Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang

Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Menurut ketentuan pasal 49 juga dijelaskan bahwa wewenang Pengadilan Agama hanya mengadili perkara-perkara tersebut di tingkat pertama. Adapun pada tingkat banding (yang lebih tinggi) yang menanganinya adalah Pengadilan Tinggi Agama (pasal 51).

Alasan kedua yang dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah karena objek gugatan kabur. Kejelasan dalam upaya adanya kepastian hukum terhadap harta peninggalan/ warisan cepat atau lambat adalah sebuah persoalan yang harus diselesaikan, suka atau tidak suka itulah fenomena dalam kehidupan bagi setiap muslim yang masih mempunyai nafas. Mengenai permasalahan waris berhubungan dengan hak dan kewajiban, artinya setiap ahli waris mempunyai hak untuk mendapatkan bagiannya masing-masing, dan kewajiban dari setiap ahli warislah untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan tersebut, sebagaimana firman Allah QS. al-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ

“Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah berjanji prasetia dengan kamu, berikanlah bagian mereka...” (QS. al-Nisa’ : 33).

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. al-Nisa’; 7).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Allah Ta’ala mewashiyatkan bagimu mengenai anak-anakmu, (yakni)

bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

(QS. al-Nisa’ : 11).

Alasan ketiga yang dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah karena kurangnya jumlah para penggugat yang seharusnya diikutsertakan. Dalam menilai terpenuhinya syarat-syarat formil sebuah surat gugat, sering kali menjadi perdebatan dan perbedaan antar hakim. Misalnya dalam sengketa waris, ada hakim yang berpendapat keharusan melibatkan semua ahli-waris dalam sengketa, sehingga kalau ada ahli-waris yang berhak tetapi ia tidak mau menggugat, maka ia harus didudukkan sebagai “turut tergugat”, sebuah istilah baru dan diadakan di luar hukum acara. Jika tidak mengikuti patron ini, maka gugatan waris tersebut dinilai sebagai gugatan yang cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*) karena kurang pihak (*plurium litis*

consortium). Perbedaan pendapat yang demikian ini ternyata tidak hanya terjadi antar hakim dalam suatu majlis yang melahirkan *disenting opinion*, akan tetapi juga terjadi antara majelis hakim peradilan tingkat pertama dengan tingkat banding, bahkan antara putusan hakim banding dengan putusan kasasi. Hal tersebut dapat diketahui antara lain dari putusan-putusan berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “pertimbangan *yudex faksi* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, *tidak dapat dibenarkan*, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”.
- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa : “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

Nampaknya akhir-akhir ini pendapat mayoritas (*grand opinion*) lebih banyak cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu bahwa dalam gugatan sengketa waris segenap “ahli waris” harus didudukkan sebagai pihak. Ahli-waris yang pasif harus didudukkan sebagai “turut tergugat”. Akibat adanya dua pendapat besar tersebut, banyak putusan yang disparitas antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding, antara pengadilan tingkat banding dengan putusan tingkat kasasi. Akibat lain adalah menimbulkan stigma negatif seakan-akan lembaga peradilan masih belum mempunyai *law standard*

dalam menangani masalah ini. Bahkan ada penilaian bahwa peradilan belum mempunyai kesamaan pandang (*unified legal opinion*) serta keseragaman (*unified legal fram work*) dalam menangani kasus yang sama.

Perbedaan pendapat bagi seorang hakim dengan lainnya adalah sah-sah saja, apa lagi bila dilihat dari perspektif *ushul fiqh*, bahwa masing-masing hakim adalah *mujtahid* sehingga baginya berlaku kaidah *al-ijtihaad la yaungqodlu bi al-ijtihadi*, akan tetapi bagaimanapun juga putusan yang disepakati (*ittifaq*) lebih kredibel dari daripada putusan yang terdapat *ikhtilaf*. Masalah utamanya adalah : (1) Dalam sengketa waris apakah semua ahli-waris harus dilibatkan menjadi pihak? dan (2) Apa maksud dan kepentingan pihak didudukkan sebagai “turut tergugat”? Gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *error in persona*. Menurut ilmu pengetahuan, gugatan cacat karena *error in persona*, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. *Diskwalifikasi in person*, karena penggugatnya bukan *persona standi in judicio*; Misalnya penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas; Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain,
- b. *Gemis Aanhoedanig Heid*; yaitu orang yang ditarik/yang didudukkan sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi,

c. *Plurium Litis Consortium*; yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Plurium litis consortium, berasal dari bahasa latin *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan sejawat pihak berperkara. Dalam referensi hukum para ahli hokum boleh dikatakan tidak ada yang membicarakannya secara tuntas dan memadai masalah ini, kebanyakan mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiyah (*etimologis*), sehingga dalam tataran praktis memunculkan tafsiran dan pemahaman yang *subyektif-fareatif*.

Jika dilakukan analisis atas putusan a quo, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar. Karena pada kasus a quo, pihak ketiga secara nyata (lahiriyah) telah menguasai barang/obyek sengketa sehingga seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum *bezit*, mempunyai fungsi *polisionil*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak milik” atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang “*membezit*” sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti di muka

pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O).

Kasus tersebut di atas, amat sangat berbeda sekali dalam kasus-kasus sengketa ahli waris pada umumnya. Kasus-kasus sengketa waris seringkali pihak ahli-waris yang tidak menguasai barang/obyek warisan tetapi juga tidak mau menggugat tetap diwajibkan dilibatkan sebagai pihak “turut tergugat”. Atau dengan kata lain dalam sengketa waris, segenap ahli waris termasuk yang tidak menguasai “barang warisan” harus dilibatkan sebagai pihak. Akibatnya gugatan yang tidak mengikuti patron ini dianggap sebagai gugatan yang cacat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr Tanggal 26 Juli 2007 tentang Kewarisan, dalam hal ini tentang pemberian hibah kepada anak angkat sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; Dr. H. Kamaluddin Bakar, MPH., terhadap Tergugat; Aminah binti Rajiman yang beralamat di Perumahan Damai Langgeng Jalan Meranti Blok A I No. 39, Pekanbaru, adalah anak angkat dari Almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah, pernah menerima hibah dari orangtua angkatnya tersebut berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas \pm 680 M², Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman berdasarkan Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976 di hadapan Camat Tebing Tinggi Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru memutuskan bahwa hibah yang telah diterima oleh Aminah binti Rajiman tersebut dinilai cacat hukum, karena: (1)terdapat perbedaan nomor dan tanggal surat dan akta hibah Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman, dan (2) Akta Hibah Nomor : 27 Tahun 1967 pada

tanggal 16 Desember 1976 sehingga harta peninggalan tersebut kembali kepada status quo dan sepenuhnya menjadi hak dari para Penggugat, mereka adalah ahli waris yang sah (cucu kandung) dari almarhum Dollah Oesman (kakek) dan almarhumah Sutinah (nenek), serta orang tua kandungnya, yaitu almarhum H. Aboe Bakar Oemar (ayah dan menantu dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah) dan almarhumah Nurani binti Dollah Oesman (ibu dan anak kandung dari almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah). Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah atas nama Nurbaya Bakar, Reg. No. 09/SKT/KTT/2005 tanggal 27 September 2005, dengan luas ± 866 M².

Keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru tersebut telah dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau Nomor 47/Pdt.G/2007 /PTA.Pbr tanggal 26 Juli 2007M dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan 568 K/AG/2008, yang pada pokoknya telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr, dan menetapkan bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 33 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis dengan luas ± 680 M², Sertifikat Nomor : 313, tertanggal 7 April 1997 atas nama Aminah binti Radjiman dikembalikan kepadanya sebagai hibah dari orangtua angkatnya, almarhum Dollah Oesman dan almarhumah Sutinah berdasarkan Akta Hibah Nomor 27 Tahun 1967 pada tanggal 16 Desember 1976 di hadapan Camat Tebing Tinggi Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama

Provinsi Riau dan Mahkamah Agung RI dalam membatalkan keputusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Nomor 362/Pdt.G/2006 /PA.Pbr dalam hal pemberian hak waris anak angkat; (1) objek gugatan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru; oleh karena objek gugatan harta warisan adalah harta benda tidak bergerak yang diajukan oleh Para Penggugat yang terletak di wilayah Pengadilan Agama Selatpanjang, maka seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Agama Selatpanjang, (2) gugatan kabur; para Penggugat tidak jelas dalam membuat gugatan di mana tidak menjelaskan secara terperinci mana harta warisan, harta bersama maupun harta milik pribadi dari para Tergugat, (3) kurangnya jumlah para penggugat; menurut Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546/K/SIP/1984 tanggal 31 Agustus 1985 sebagai berikut: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua yang berkepentingan dalam masalah ini," dan (4) penggugat tidak berkualitas; para Penggugat Konvensi telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Pandangan Hukum Islam terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dan Keputusan Mahkamah Agung RI tentang pemberian hibah kepada anak angkat telah sesuai dengan pandangan Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang menyatakan bahwa "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Di samping itu, pemberian hibah kepada anak angkat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 210-214 yang menyatakan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

B. Saran-saran

Sebagai penutup penulis menyampaikan saran-saran kepada masyarakat Muslim di Indonesia yang mengangkat anak dan memiliki anak angkat agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pertauran perundang-undangan, salah satunya adalah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam agar tidak menghadapi permasalahan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian waris. Kepada lembaga Peradilan Islam dan Institusi terkait agar senantiasa memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Muslim tentang implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Baqi', Muhammad Fu'ad. *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Maktabah dar al-Salam, Kairo, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Presindo, 1995.
- Abu Bakar, al-Imam Taqiyuddin bin. *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II.
- Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.
- Aprillia Senja, M. Zul Fajri dan Ratu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Difa Publisher, 2000.
- Arief, Eddy Rudiana. *Hukum Islam Di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung , 1991.
- Barri, Zakaria Ahmad al-. *Ahkamu al-Aulad Fiy al-Islam*, Kairo, Daru al-Qaumiyah, 2000.
- Basyir, Azhar. *Adopsi dan Status Hukumnya*, dalam *www. google. com*, Dikases Tanggal 16 Maret 2012.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta; Akademika Presindo, 1985.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Gratindo Persada, Jakarta, 1998.
- Depag RI, Tim Penterjemah. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 1991.
- Diknas RI, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Diknas RI, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.
- Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1982.
- Jarjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974.

- Jazairi, Abd. Al-Rahman al-. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir, 1969.
- Khisyyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Mizan, Bandung, 1997.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
- Naisburiy Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-. *Shaheh Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, Juz IV.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1994.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu, 1982, Jilid I dan II.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV, Terjemahan, Dar al-Ma'arif, Bandung, 1990.
- Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola Surabaya, Surabaya, 1997.
- Sayuti Thalib, *Azas Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Shan'ani, al-Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-. *Subul al-Salam*, Maktabah Dahlan Bandung, tt, Juz III.
- Sidqon, Irfan. *Fiqh Munakahat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Jilid II.
- Soekanto dan Soleman B. Takeko, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Sudiat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta; Liberty, 1981.

- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suyuthi, Imam Jalal al-Din al-. *al-Jam'u al-Jawami'*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz 12.
- Syatibiy, al- Imam. *al-Muwafaqat.*, Beirut : Dar al-Fikr, tt, Juz II.
- Tafal, Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta : Rajawali, 1983.
- Takeko, Soerjono Soekanto dan Soleman B. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 1983.
- Thayib, Anshari. *Struktur Rumah tangga Muslim*, PT. Risalah Gusti, Surabaya, 1994.
- Wignjodipuro, Soerjono. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Zahrah, Abu. *Fiqh al-Islam*, Kairo : Dar al-Manar, 1990.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1992.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1992.
- Maman, dkk., *Metodologi Penelitian Agama ; Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rajawali Press, 2004.
- Maloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Patton, Michael Quin. *Qualitative Evolution and Reasearch Methode*, Newbury Park : Sage Publication, 1990.
- Qardawi, Syaikh Yusuf al-, *Halal Haram dalam Islam*, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu, 1982, Jilid I dan II.